

**STRATEGI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG DALAM
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) PADA TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

SKRIPSI

OLEH:

**Muhamad Nouval Hilmy
NIM. 220106110092**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**STRATEGI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG DALAM
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) PADA TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

SKRIPSI

Diajukan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam untuk pemenuhan
Tugas Akhir sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S.Pd)

OLEH:

**Muhamad Nouval Hilmy
NIM. 220106110092**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)” oleh Muhamad Nouval Hilmy ini telah dipertahankan di depan penguji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 24 Juni 2026.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

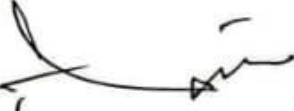
Penguji Utama

Siti Ma'rifatul Hasanah, M. Pd
NIP. 198510152019032012


()

Ketua Sidang

Dr. Sutrisno, M.Pd
NIP. 196504031995031002


()

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mulyono, M.A
NIP.196606262005011003


()

Dosen Pembimbing

Dr. H. Mulyono, M.A
NIP.196606262005011003


()

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Muhammad Walid, M.A.
NIP. 9730821280003 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**STRATEGI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG DALAM
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) PADA TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP)**

Oleh:

Muhamad Nouval Hilmy

NIM. 220106110092

**Telah diperiksa dan disetujui untuk
dipertanggungjawabkan dalam sidang skripsi**

Dosen Pembimbing



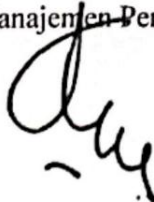
Dr. H. Mulyono, M.A

NIP. 196606262005011003

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Manajemen Pendidikan Islam



Ulfah Muhayani, M.PP., Ph.D

NIP. 97906022015032001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Dr. H. Mulyono. M.A
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, 15 Juni 2026

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Di Malang

Assalamualaikum Wr Wb.

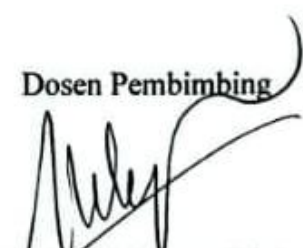
Setelah melakukan beberapa kali pelaksanaan bimbingan secara tatap muka, baik dari segi bahasa, teknik kepenulisan, maupun dari segi isi penelitian skripsi dari mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Nouval Hilmy
NIM : 220106110092
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Strategi Dinas Pendidikan Malang Dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Oleh karena itu, selaku pembimbing skripsi dari mahasiswa diatas, maka kami berpendapat bahwasanya mahasiswa sudah layak untuk mempertanggungjawabkan penelitian skripsinya dalam sidang skripsi. Demikian rekomendasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Dosen Pembimbing


Dr. H. Mulyono, M.A
NIP.196606262005011003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Nouval Hilmy

NIM : 220106110092

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan karya sendiri, bukan hasil plagiasi dari karya yang telah ditulis atau diterbitkan orang lain. Adapun pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah dan dicantumkan dalam daftar rujukan. Apabila dalam skripsi ini terdapat unsur plagiasi, maka saya selaku penulis bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



Muhamad Nouval Hilmy
NIM. 220106110092

HALAMAN MOTTO

إِنْ لَمْ تَذُقْ مَرَّةً التَّعْلُمَ سَاعَةً ﴿٥﴾ تَجَرَّعْتَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِكَ

"Jika kamu tidak pernah merasakan pahitnya belajar walau sesaat, maka kamu akan menenggak hinanya kebodohan sepanjang hidupmu."

— Imam Syafi'i

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala kemudahan, kekuatan, dan nikmat-Nya yang luar biasa, perjalanan panjang ini akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah yang selalu menjadi inspirasi dalam setiap langkah kehidupan.

Dengan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana dari hasil perjuangan ini sepenuhnya saya persembahkan untuk:

1. Teruntuk Orang Tua dan Saudara Tercinta Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan, doa, dan fasilitas yang selalu dikasih dari awal masuk kuliah sampai akhirnya bisa ada di titik kelulusan ini. Terima kasih karena sudah menjadi support sistem yang tenang di rumah, selalu memberikan kepercayaan penuh, dan membebaskan saya untuk berproses selama merantau di Malang tanpa banyak menuntut ini-itu. Perjalanan kuliah ini tentu gak akan bisa berjalan lancar tanpa adanya restu dan bantuan finansial yang selalu siap sedia kapan pun saya butuhkan. Semoga pencapaian ini bisa jadi hadiah kecil yang bikin kalian bangga, ya
2. Kepada Yang Terhormat Dosen Pembimbing, Kaprodi, Sekprodi, dan Seluruh Dosen MPI UIN Malang Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dosen pembimbing yang sudah sangat sabar mengarahkan dan meluangkan waktunya buat mengoreksi skripsi ini—meskipun sayanya sering hilang-timbul karena sibuk hal lain, hmmm maaf ya Pak/Bu, hehe. Terima kasih juga kepada Bapak/Ibu Kaprodi, Sekprodi, serta seluruh dosen Manajemen

Pendidikan Islam UIN Malang atas semua ilmu, bimbingan, dan coretan revisi yang berharga selama masa perkuliahan.

3. Buat Teman-Teman Saya, Terima kasih banyak sudah bikin masa-masa kuliah di Malang jadi jauh lebih seru, berwarna, dan gak *flat* sama sekali. Makasih buat Teman Kamar Ibnu Sina 42 atas semua memori awal-awal masuk kuliah pas masih adaptasi jadi maba. Makasih buat teman-teman UKM Jepret Club Fotografi, terima kasih atas kepercayaannya pas saya menjabat jadi ketua, pengalaman berharganya, dan semua momen hunting seru dari pagi ketemu pagi—mohon maaf ya kalau selama menjabat kemarin sayanya masih banyak salahnya, wkwk. Makasih buat Teman-Teman Sepekerjaan yang sudah solid banget, makasih atas pengertiannya, obrolan seru di sela-sela shift, dan dukungannya biar saya cepat lulus. Gak lupa juga buat Teman Kontrakan yang selalu jadi tempat paling nyaman buat sambat malam-malam, mabar, masak bareng, sampai ngopi-ngopi penenang pikiran pas skripsi lagi mentok. Untuk seluruh teman-teman lain yang gak bisa disebut satu per satu, makasih banyak atas relasi dan solidaritasnya selama ini... ah, kalau dipikir-pikir bakal kangen juga ya ternyata sama lingkaran pertemanan ini.
4. Dan terakhir spesial untuk Diri Saya Sendiri, *Huhhh... finally, we made it!* Terima kasih ya sudah mau bertahan, mencoba tetap konsisten, dan nggak menyerah meskipun harus belajar membagi waktu antara kuliah, skripsian, kerja, sampai ngurusin organisasi. Terima kasih sudah mau diajak kerja sama dengan baik buat menyelesaikan apa yang sudah dimulai, walaupun kadang harus sering begadang dan mengorbankan jam tidur. Perjalanan

yang lumayan melelahkan, tapi bersyukur banget akhirnya bisa sampai di titik ini. Mari bersiap buat petualangan

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Namun besar harapan saya, semoga coretan kecil dan ilmu yang tertuang di dalam karya ini bisa membawa manfaat yang luas, baik untuk diri saya pribadi, para pembaca, maupun bagi perkembangan dunia pendidikan. Semoga apa yang telah diikhtiarkan ini dicatat sebagai amal kebaikan, mendatangkan keberkahan yang mengalir, dan menjadi langkah awal yang baik untuk mengetuk pintu-pintu kesuksesan serta kebahagiaan di masa depan.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan fisik dan pikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)" ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia menuju peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya karya ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta dan keluarga besar, yang senantiasa menjadi madrasah pertama bagi penulis, memberikan doa yang tiada putus, serta dukungan moral dan material yang luar biasa selama masa studi.
2. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Mrs. Ulfa Muhayani, MPP, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

4. Dr. H. Mulyono, M.A, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta seluruh civitas akademika, yang telah membekali penulis dengan wawasan luas selama perkuliahan.
6. Dr. Suwadi, S.IP., M.Si, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan izin, mempermudah birokrasi, dan membantu penulis selama proses pengumpulan data penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan dunia pendidikan, khususnya dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam.

Malang, 15 Juni 2026

Muhamad Nouval Hilmy

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam proposal ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

أ = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = t	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (open)	ء = ' (close)
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

أ = aw

أَي = ay

أ = u

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	II
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	III
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	IV
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	V
HALAMAN MOTTO.....	VI
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	VII
KATA PENGANTAR	X
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	XII
DAFTAR ISI.....	XIII
DAFTAR TABEL.....	XV
DAFTAR GAMBAR	XVI
DAFTAR LAMPIRAN.....	XVII
ABSTRAK.....	XVIII
ABSTRACT.....	XIX
مستخلص البحث.....	XX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Istilah.....	19
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Konsep Strategi	24
B. Anak tidak sekolah (ATS).....	26
C. Prespektif Teori dalam Islam	30
D. Kerangka berfikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36

B. Kehadiran Peneliti.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Subjek Penelitian	38
E. Data dan Sumber Data	39
F. Instrumen Penelitian	40
G. Teknik Pengumpulan Data	41
H. Analisis Data	42
I. Pengecekan Keabsahan Data	43
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	45
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	45
B. Paparan Data	48
C. Hasil Temuan Penelitian	73
BAB V PEMBAHASAN	76
A. Perencanaan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Menangani ATS Tingkat SMP	76
B. Implementasi Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Menangani ATS Tingkat SMP	80
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Menangani ATS Tingkat SMP	85
D. Bagan Hasil Temuan Penelitian	89
BAB VI PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Orisinalitas Penelitian	15
Table 4.1 Hasil Temuan Penelitian	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang	46
Gambar 4.2 <i>Dashboard</i> ATS Kemendikdasmen	52
Gambar 4.3 Susunan Keanggotaan SABER ATS	62
Gambar 4.4 Kordinasi Penanganan ATS Bersama DPRD Kab. Malang	63
Gambar 4.5 Sosialisasi Penanganan ATS Oleh Dinas.....	70
Gambar 4.6 Rapat Evaluasi Triwulan Dinas Pendidikan Kab. Malang	73
Gambar 5.1 Bagan Temuan Penelitian	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	99
Lampiran 2 Dokumentasi	100
Lampiran 3 Observasi	101
Lampiran 4 Instrumen Wawancara	102
Lampiran 5 Trankrip Wawancara	104

ABSTRAK

Hilmy, Muhamad Nouval. 2026. Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mulyono, M.A.

Kata Kunci: Strategi Dinas Pendidikan, Anak Tidak Sekolah (ATS), Program Saber ATS, Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) tingkat SMP di Kabupaten Malang merupakan persoalan krusial yang dipicu oleh faktor ekonomi, rendahnya motivasi, dan masalah kultural. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memegang peranan strategis selaku otoritas regional dalam merumuskan dan melaksanakan intervensi penanganan masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan strategi, implementasi nyata di lapangan, serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan strategi penanganan ATS pada jenjang SMP di Kabupaten Malang.

Penelitian kualitatif studi kasus ini menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci (pengamat partisipan) di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci (Kasi SMP, Kasi PAUD, staf pengadministrasi), observasi kegiatan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan strategi penanganan ATS dibangun di atas tata kelola berbasis data makro *Dashboard* ATS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memetakan kasus, melakukan verifikasi berjenjang hingga tingkat desa, dan merumuskan program lintas bidang. Implementasi strategi diwujudkan melalui inovasi program Saber ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah) yang didukung sistem SIM Saber ATS melalui kolaborasi multi-aktor secara persuasif (*door-to-door*).

Jalur reintegrasi anak dibagi menjadi jalur formal (kembali ke SMP dan bantuan PIP) dan non-formal (Paket B di PKBM), yang berhasil menurunkan jumlah ATS sebesar 11,96%. Faktor pendukung meliputi sinergi antarinstansi, peran tokoh masyarakat, dan integrasi sistem data. Sementara faktor penghambatnya adalah rendahnya motivasi anak, kurangnya kesadaran orang tua, kemiskinan struktural, dan kendala administrasi akibat mobilitas domisili penduduk.

ABSTRACT

Hilmy, Muhamad Nouval. 2026. The Strategy of the Malang Regency Education Office in Handling Out-of-School Children (OSC) at the Junior High School (JHS) Level. Thesis, Islamic Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Mulyono, M.A.

Keyword: *Education Office Strategy, Out-of-School Children (OSC), Saber ATS Program, Junior High School (JHS).*

The phenomenon of Out-of-School Children (OSC) at the junior high school level in Malang Regency is a crucial issue triggered by economic factors, low motivation, and cultural issues. The Malang Regency Education Office plays a strategic role as the regional authority in formulating and implementing interventions. This study aims to analyze the strategic planning, actual field implementation, and the supporting and inhibiting factors influencing the success of the OSC handling strategy at the junior high school level in Malang Regency.

This qualitative case study positions the researcher as the key instrument (participant observer) at the Malang Regency Education Office. Data were collected through semi-structured interviews with key informants (Head of JHS Section, Head of ECE Section, administrative staff), direct observations, and documentation. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model (reduction, display, and conclusion drawing). Data trustworthiness was checked using source and method triangulation.

The results show that strategic planning is built on a data-driven governance framework using the Ministry of Basic and Secondary Education's OSC Dashboard to map cases, verify data down to the village level, and formulate cross-sectoral programs. The strategy is implemented through the Saber ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah) program, supported by the SIM Saber ATS information system through persuasive door-to-door multi-actor collaboration.

Reintegration pathways include formal education (re-enrollment in JHS with PIP scholarships) and non-formal education (Package B at PKBM), successfully reducing OSC by 11.96%. Main supporting factors are inter-agency synergy, the role of community leaders, and integrated data systems. Meanwhile, inhibiting factors include low internal motivation of children, lack of parental awareness, structural poverty, and administrative constraints due to high population mobility.

مستخلص البحث

محمد نوفال حلمي.. استراتيجيات دائرة التربية في محافظة مالانغ في معالجة الأطفال غير الملحقين بالمدارس على مستوى المدرسة المتوسطة الأولى. بحث جامعي، قسم إدارة التربية الإسلامية، كلية علوم التربية والتعليم، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: الدكتور الحاج موليونو، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: استراتيجيات دائرة التربية، الأطفال غير الملحقين بالمدارس، برنامج سابر، المدرسة المتوسطة الأولى.

تعد ظاهرة الأطفال غير الملحقين بالمدارس على مستوى المدرسة المتوسطة الأولى في محافظة مالانغ مشكلة جوهرية نتجت عن عوامل اقتصادية وضعف الدافعية ومشكلات ثقافية. وتؤدي دائرة التربية في محافظة مالانغ دورا استراتيجيا بوصفها الجهة الإقليمية المسؤولة عن صياغة التدخلات وتنفيذها لمعالجة هذه المشكلة. ويهدف هذا البحث إلى تحليل تخطيط الاستراتيجيات، وتطبيقها الفعلي في الميدان، والعوامل الداعمة والمعوقة التي تؤثر في نجاح استراتيجيات معالجة الأطفال غير الملحقين بالمدارس على مستوى المدرسة المتوسطة الأولى في محافظة مالانغ.

اعتمد هذا البحث النوعي على منهج دراسة الحالة، حيث قام الباحث بدور الأداة الرئيسة للبحث بصفته ملاحظا مشاركا في دائرة التربية بمحافظة مالانغ. وجمعت البيانات من خلال المقابلات شبه المنظمة مع المخبرين الرئيسيين، وهم رئيس قسم المدرسة المتوسطة الأولى، ورئيس قسم التربية في مرحلة الطفولة المبكرة، والموظف الإداري، إضافة إلى الملاحظة الميدانية ودراسة الوثائق. وتم تحليل البيانات باستخدام النموذج التفاعلي لمايلز وهوبرمان المتمثل في اختزال البيانات وعرضها واستخلاص النتائج. كما تم التحقق من صحة البيانات من خلال التثليث في المصادر والأساليب.

وأظهرت نتائج البحث أن تخطيط استراتيجيات معالجة الأطفال غير الملحقين بالمدارس يقوم على حوكمة قائمة على البيانات الكلية المستمدة من لوحة معلومات الأطفال غير الملحقين بالمدارس التابعة لوزارة التربية الأساسية والثانوية، وذلك من أجل تحديد الحالات والتحقق منها على مراحل حتى مستوى القرية وصياغة البرامج المشتركة بين مختلف القطاعات. وقد تجسدت الاستراتيجية في تطبيق برنامج سابر (التطهير الشامل للأطفال غير الملحقين بالمدارس) المدعوم بنظام معلومات إدارة سابر من خلال تعاون متعدد الأطراف وبأسلوب إقناعي يعتمد الزيارات المنزلية المباشرة.

وتم تقسيم مسارات إعادة دمج الأطفال إلى مسار رسمي يتمثل في إعادتهم إلى المدارس المتوسطة الأولى وتقديم مساعدات برنامج إندونيسيا الذكية، ومسار غير رسمي يتمثل في الالتحاق ببرنامج الحزمة باء في مراكز الأنشطة التعليمية المجتمعية، مما أسهم في خفض نسبة الأطفال غير الملحقين بالمدارس بمقدار 11.96%. وتشمل العوامل الداعمة التعاون بين المؤسسات ودور الشخصيات المجتمعية وتكامل أنظمة البيانات، في حين تتمثل العوامل المعوقة في ضعف دافعية الأطفال وقلة وعي أولياء الأمور والفقر البنوي والصعوبات الإدارية الناجمة عن تنقل السكان وتغير أماكن إقامتهم.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan ialah fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa karena berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter.¹ Dalam sudut pandang pembangunan, pendidikan tidak sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang mampu mengubah struktur kehidupan masyarakat menuju kondisi yang lebih maju dan sejahtera.² Melalui pendidikan, individu memperoleh kemampuan berpikir kritis, keterampilan produktif, serta kesadaran sosial yang menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika perubahan zaman. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan pendidikan sangat sering dijadikan indikator utama dalam mengukur tingkat majunya suatu daerah maupun negara.

Secara konstitusional, hak atas pendidikan telah dijamin oleh negara sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Konsekuensinya, pemerintah tidak hanya berkewajiban menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan pemerataan layanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.³ Dalam kerangka desentralisasi pendidikan, pemerintah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan nasional agar sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis wilayah masing-masing. Artinya, keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah

¹ Jeni Suharti and Haifaturrahmah Haifaturrahmah, 'Pentingnya Pendidikan Sebagai Fondasi Pembangunan Bangsa', *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629 3, no. 2 (2025): 593.

² Entoh Tohani, *Hubungan Dialektis Pendidikan dan Pembangunan* (UNY Press, 2020).

³ I. Dewa Gede Palguna and Bima Kumara Dwi Atmaja, 'Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 351.

dalam merumuskan strategi yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa upaya pemerataan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.⁴ Kesenjangan ekonomi, kondisi geografis, rendahnya kesadaran pendidikan dalam keluarga, serta dinamika sosial remaja menjadi faktor yang dapat menghambat keberlangsungan pendidikan anak usia sekolah.

Fenomena anak tidak sekolah (ATS) merupakan salah satu persoalan krusial dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Anak tidak sekolah merujuk pada anak usia sekolah yang belum pernah mengenyam pendidikan formal, mengalami putus sekolah sebelum menyelesaikan jenjang tertentu, atau tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya.⁵ Keberadaan ATS menunjukkan bahwa akses dan keberlanjutan pendidikan belum sepenuhnya merata, meskipun kebijakan wajib belajar telah diberlakukan.⁶ Permasalahan ini tidak hanya bersangkutan dengan aspek administratif dalam pendataan pendidikan, namun juga mencerminkan adanya hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi anak dalam sistem pendidikan formal.

Urgensi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia semakin dipertegas melalui komitmen yuridis terbaru pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Kebijakan ini menegaskan kembali amanat

⁴ Martinus Wika, 'Antara Komitmen Dan Realita: Studi Kualitatif Terhadap Kebijakan Pemerataan Pendidikan Di Wilayah Terpencil Merauke', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (2025): 89.

⁵ Rokhmaniyah et al., *Anak Putus Sekolah, Dampak, dan Strategi Mengatasinya* (CV Pajang Putra Wijaya, 2022).

⁶ Wika, 'Antara Komitmen Dan Realita', hlm 89.

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Meskipun program wajib belajar 12 tahun telah berjalan demi meratakan mutu pendidikan, pada realitasnya masih ditemukan hambatan di lapangan berupa angka anak tidak sekolah maupun anak yang berisiko tinggi putus sekolah. Melalui Perpres ini, pemerintah melakukan percepatan kebijakan wajib belajar menjadi 13 (tiga belas) tahun serta menginstruksikan pemenuhan standar pelayanan minimal secara terstruktur, terpadu, dan berkesinambungan melalui sinergi tim koordinasi di tingkat pusat hingga ke pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam menangani kasus anak tidak sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi sangat krusial, guna menguji implementasi nyata dari regulasi nasional ini dalam memetakan, mencegah, dan mengembalikan anak ke jalur layanan pendidikan formal maupun nonformal di tingkat daerah.⁷

Berbagai faktor menjadi penyebab munculnya fenomena tersebut, mulai dari keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan dalam lingkungan rumah tangga, sampai pengaruh lingkungan sosial dan kondisi geografis.⁸ Pada usia remaja, tekanan untuk bekerja, pergaulan sebaya, serta praktik pernikahan dini turut meningkatkan risiko putus sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Dampaknya tidak bersifat individual semata, melainkan berimplikasi terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara jangka panjang.⁹

⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026. Sekretariat Negara.

⁸ Janeman and Mesra, *Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kelurahan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, Dan 3 UUD 1945*, 9, no. 2 (n.d.), hlm 1377.

⁹ Maslukha et al., *Faktor Penentu Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kelanjutan Pendidikan dalam Era Wajib Belajar 12 Tahun | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2026, hlm 247.

Situasi ini menuntut adanya strategi yang komprehensif dan terarah dari pemerintah daerah guna memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan secara berkelanjutan.

Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau mempunyai posisi yang amat strategis dalam struktur pendidikan nasional karena menjadi fondasi penentu keberlanjutan pendidikan ke jenjang menengah atas serta kualitas kesiapan kerja di masa depan.¹⁰ Pada tahap ini, anak berada dalam masa remaja awal yang sarat dengan perubahan psikologis dan sosial, sehingga lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan, tekanan ekonomi keluarga, maupun pergaulan sebaya. Kegagalan mempertahankan partisipasi sekolah pada jenjang ini tidak hanya berimplikasi pada terhentinya proses wajib belajar, tetapi juga berpotensi mempersempit peluang anak untuk melanjutkan pendidikan, meningkatkan risiko keterlibatan dalam pekerjaan informal usia dini, serta memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Dengan demikian, meningkatnya angka anak tidak sekolah pada tingkat SMP bukan sekadar persoalan administratif pendidikan, melainkan persoalan strategis pembangunan daerah yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.¹¹ Oleh karena itu, penanganan anak tidak sekolah pada jenjang ini menuntut perhatian dan strategi yang lebih terfokus dari pemerintah daerah.

Berdasarkan data Verifikasi dan Validasi ATS yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Malang tercatat sebanyak 28.021 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan keberlanjutan pendidikan masih menjadi tantangan yang signifikan.

¹⁰ Farid et al., 'Analisis Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)', *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 1-2.

¹¹ Astuti, 'Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan', *JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN* 22, no. 2 (2024): hlm 101.

Sedangkan pada usia SMP atau rentang usia 13–15 tahun tercatat sebanyak 1.956 anak (11,74%).¹²

Upaya penanganan yang paling strategis berada pada rentang usia 13–15 tahun atau jenjang SMP. Pada fase ini, anak berada pada masa transisi dari pendidikan dasar menuju pendidikan menengah, sehingga risiko putus sekolah cenderung meningkat akibat faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, maupun rendahnya motivasi belajar.¹³ Intervensi pada jenjang ini menjadi krusial karena mampu mencegah bertambahnya angka ATS pada kelompok usia yang lebih tinggi. Dengan kata lain, keberhasilan mempertahankan anak tetap bersekolah di tingkat SMP berpotensi memutus rantai peningkatan prevalensi ATS di usia 16–18 tahun hingga 19–25 tahun. Oleh karena itu, strategi penanganan yang terfokus pada jenjang SMP tidak hanya bersifat kuratif, namun juga preventif dalam menekan pertumbuhan angka Anak Tidak Sekolah secara berkelanjutan.

Secara konseptual, Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat dikelompokkan menjadi tiga tipologi utama: putus sekolah (Drop Out/DO), belum pernah bersekolah (BPB), serta lulus tidak melanjutkan (LTM). Kategori DO merujuk pada peserta didik yang sempat mengenyam pendidikan formal tetapi berhenti sebelum tamat pada jenjang tersebut. Sebaliknya, kelompok BPB adalah anak-anak yang sama sekali belum pernah tersentuh oleh layanan pendidikan formal. Di sisi lain, status LTM disematkan kepada anak yang berhasil menamatkan suatu tingkat pendidikan namun gagal meneruskan ke tahapan selanjutnya. Variasi profil ini mengindikasikan bahwa isu ATS dipicu oleh akar masalah yang sangat kompleks,

¹² Kemendikdasmen, 'Data Anak Tidak Sekolah (ATS)', accessed 9 March 2026, <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/index.php/Dashboard-ats>.

¹³ Langi Sofiana Sarah Lini et al., 'Analisis Anak Putus Sekolah Tingkat SMP Di Desa Lemoh Timur', *JIPSINDO* 8, no. 2 (2021): 165–182, <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v8i2.42659>.

sehingga menuntut adanya strategi penyelesaian yang spesifik dan tidak bisa disamaratakan.¹⁴

Kedudukan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menjadi penting dalam merancang strategi penanganan ATS yang tepat sasaran. Penanganan terhadap anak DO dapat dilakukan melalui program penarikan kembali ke sekolah atau melalui jalur pendidikan kesetaraan. Anak BPB memerlukan strategi penjangkauan dan pendataan agar dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal. Anak LTM membutuhkan dukungan berupa fasilitasi akses pendidikan lanjutan serta penguatan motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Strategi yang disusun secara komprehensif diharapkan mampu menjangkau berbagai kategori ATS tersebut sehingga upaya penanganan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berbagai literatur terdahulu telah banyak menyoroti langkah-langkah penanggulangan permasalahan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS). Salah satu kajian yang relevan adalah riset dari Limbong, Purnomo, dan Halik mengenai taktik Pemerintah Kota Sorong dalam merespons fenomena tersebut. Hasil studi mereka menegaskan bahwa rumusan strategi pemerintah daerah sangat bergantung pada target kebijakan, orientasi program, hingga dinamika kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.¹⁵ Kajian serupa yang berfokus di wilayah Kota Pekalongan turut dilakukan oleh Astuti terkait upaya penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS). Hasil riset tersebut menggarisbawahi esensi kolaborasi lintas sektoral dalam menuntaskan problem ini. Sinergi tersebut direkomendasikan

¹⁴ Kemendikdasmen, *Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)*, accessed 9 March 2026, <https://duniapenfi.kemendikdasmen.go.id/program-prioritas/relawan-pendidikan>.

¹⁵ Elsi Salu Limbong et al., 'Strategi Pemerintah Kota Sorong Dalam Mengatasi Tantangan Anak Putus Sekolah', *Jurnal Maladum* 3, no. 1 (2025): 29–40, <https://doi.org/10.33506/jm.v3i1.4725>.

berjalan melalui tiga poros utama, yakni: optimalisasi regulasi pemerintah daerah, perbaikan sistem pemutakhiran data ATS, serta pembukaan akses yang lebih inklusif terhadap layanan pendidikan kesetaraan.¹⁶

Sebagai rujukan tambahan, riset yang diinisiasi oleh Resta, Harisnawati, dan Akbar di wilayah Nagari Batu Bajanjang turut menyoroti pentingnya langkah preventif terhadap tingginya angka putus sekolah. Studi tersebut menyimpulkan bahwa pencegahan ini tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan mutlak membutuhkan sinergi dari banyak pihak. Dari sisi pemerintah, peran krusial diwujudkan melalui penyaluran skema subsidi pendidikan di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang seluruhnya didedikasikan untuk menjamin keberlangsungan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut.¹⁷ Walaupun demikian, penelitian-penelitian diatas masih berfokus pada strategi pemerintah secara umum sehingga kajian mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam menangani anak tidak sekolah pada jenjang SMP di Kabupaten Malang masih perlu diteliti lebih lanjut.

Tinjauan terhadap ragam literatur di atas mengindikasikan bahwa polemik anak putus sekolah dan Anak Tidak Sekolah (ATS) telah banyak menyita perhatian akademis, terutama menyangkut akar penyebab dan taktik intervensi pemerintah. Kendati demikian, tren penelitian sebelumnya masih didominasi oleh identifikasi faktor determinan penyebab putus sekolah atau sekadar membedah kebijakan penanggulangan berskala makro di suatu wilayah. Eksplorasi yang secara spesifik

¹⁶ Tri Puji Astuti, 'Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan', *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 22, no. 2 (2024): 101–121.

¹⁷ Febrina Anda Resta et al., 'Strategi Mencegah Anak Putus Sekolah Dasar Di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 6035–6044.

menelaah manuver instansi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan terhadap target jenjang pendidikan tertentu justru tergolong sangat minim. Terlebih lagi, kajian empiris yang membedah penanganan ATS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkup Kabupaten Malang sangat jarang ditemukan.

Berangkat dari kesenjangan riset (*research gap*) inilah, pengkajian mendalam terkait strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam mengintervensi kasus ATS tingkat SMP menjadi hal yang krusial untuk dilakukan. Urgensi studi ini terletak pada kemampuannya untuk menyajikan potret komprehensif mengenai wujud nyata langkah taktis pemerintah daerah dalam mengentaskan persoalan pendidikan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang SMP?
2. Bagaimana implementasi strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Malang?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang SMP di Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang SMP.
2. Untuk menganalisis implementasi strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).

3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang SMP di Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi pada Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Penelitian ini diinginkan mampu memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan keilmuan, secara khusus pada disiplin ilmu kebijakan publik dan manajemen pendidikan. Fokus utamanya adalah pada eksplorasi dan perumusan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), supaya hasil penelitian ini bisa menjadi landasan teoritis maupun praktis yang relevan untuk pembuat kebijakan.

- b. Memperkaya Kajian Akademik.

Selain itu, riset ini dirancang untuk memperluas literatur dan diskursus akademik yang sudah ada. Secara spesifik, penelitian ini menyoroti permasalahan krusial terkait akses pendidikan serta mengidentifikasi berbagai faktor determinan yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak, khususnya pada transisi dan masa pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Secara praktis, luaran riset ini diproyeksikan mampu menyumbangkan rekomendasi konstruktif bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, khususnya Dinas Pendidikan, guna memformulasikan sekaligus

menyempurnakan strategi penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS) di tingkat SMP agar lebih berdaya guna. Di samping itu, temuan dari studi ini juga dapat difungsikan sebagai landasan evaluatif untuk meninjau ulang efektivitas berbagai regulasi maupun program intervensi yang selama ini telah digulirkan demi menekan laju pertumbuhan ATS di daerah tersebut.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan pemahaman untuk pihak sekolah mengenai pentingnya peran lembaga pendidikan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Sekolah diharapkan dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi siswa yang berisiko putus sekolah serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk mempertahankan keberlanjutan pendidikan peserta didik.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa membantu memperbaiki kesadaran masyarakat perihal pentingnya pendidikan bagi anak serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menopang program-program pemerintah yang memiliki tujuan untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji permasalahan Anak Tidak Sekolah, khususnya terkait strategi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Kajian mengenai permasalahan anak putus sekolah maupun anak tidak sekolah sudah banyak dilaksanakan oleh peneliti-peneliti dengan berbagai fokus dan pendekatan yang berbeda. Beberapa penelitian menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab anak putus sekolah, sementara penelitian lain lebih menyoroti strategi pemerintah maupun masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Keberadaan penelitian-penelitian tersebut menjadi penting sebagai landasan akademik dalam memahami permasalahan akses dan keberlanjutan pendidikan. Namun demikian, setiap penelitian memiliki fokus kajian, lokasi penelitian, serta pendekatan analisis yang berbeda.¹⁸ Berpijak pada hal tersebut, pemaparan mengenai orisinalitas riset menjadi sebuah urgensi guna menegaskan posisi akademis dari studi ini, sekaligus mencegah terjadinya duplikasi dengan karya ilmiah yang sudah ada. Lewat tinjauan ini, penulis mampu mengkomparasikan titik temu maupun diferensiasi antara riset yang sedang diajukan dengan berbagai literatur sebelumnya. Dengan demikian, letak kontribusi nyata serta unsur kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini dapat ditonjolkan secara gamblang.

Artikel yang ditulis oleh Limbong, Purnomo, dan Halik (2025) berjudul *Strategi Pemerintah Kota Sorong dalam Mengatasi Tantangan Anak Putus Sekolah* bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam menangani permasalahan anak putus sekolah. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut menyoroti peran pemerintah daerah dalam

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2021), hlm 2-3.

merumuskan strategi kebijakan pendidikan yang meliputi penentuan tujuan program, arah kebijakan, serta tindakan yang dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan anak putus sekolah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi pemerintah daerah dalam menangani anak putus sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti keterbatasan sumber daya maupun faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁹

Referensi selanjutnya datang dari Resta, Harisnawati, dan Akbar (2023) melalui riset bertajuk "Strategi Mencegah Anak Putus Sekolah Dasar di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok". Kajian ini memusatkan fokusnya pada langkah-langkah antisipatif guna menekan insiden putus sekolah pada tahapan pendidikan dasar. Secara metodologis, investigasi ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana proses penggalian datanya bertumpu pada teknik wawancara, pengamatan lapangan (observasi), serta penelusuran dokumentasi. Konklusi dari studi tersebut menegaskan bahwa upaya preventif dapat direalisasikan melalui pemberian stimulus motivasi belajar siswa, peningkatan intensitas kepedulian orang tua terhadap proses belajar anak, serta intervensi aktif dari pemerintah lewat penyaluran ragam subsidi atau bantuan pendidikan.²⁰

Penelitian oleh Tri Puji Astuti (2024) berjudul *Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan* membahas upaya pemerintah daerah pada penanganan permasalahan Anak Tidak Sekolah. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan

¹⁹ Limbong et al., 'Strategi Pemerintah Kota Sorong Dalam Mengatasi Tantangan Anak Putus Sekolah'.

²⁰ Resta et al., 'Strategi Mencegah Anak Putus Sekolah Dasar Di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok'.

eksternal yang berpengaruh pada strategi penanganan ATS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan ATS dilakukan melalui penguatan kebijakan daerah, peningkatan pendataan anak tidak sekolah, serta perluasan akses layanan pendidikan kesetaraan.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Aristin (2024) berjudul *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Bondowoso*. Penelitian ini mengenakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah pada jenjang SMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kondisi keuangan keluarga, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, serta kondisi lingkungan sosial menjadi penyebab utama terjadinya anak putus sekolah pada tingkat SMP. Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan putus sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, namun juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga serta lingkungan sekitar.²²

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khairani, Hakiki, dan Yopan (2025) yang berjudul “*Analisis Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah di Tingkat SD dan SMP di Papua: Kajian Studi Pustaka Berbasis Teori Struktural*.” Penelitian ini memakai metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya angka putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga, keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, serta kondisi geografis dan sosial masyarakat menjadi

²¹ Astuti, ‘Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan’.

²² Aristin, ‘Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kecamatan Bondowoso’, *Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, Dan Praktek Dalam Bidang Pendidikan Dan Ilmu Geografi* 20, no. 1 (2024): 4.

faktor utama yang menyebabkan terjadinya putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.²³

Kajian lain yang tak kalah relevan dipaparkan oleh Indah Wulan Sari (2025) melalui artikelnya yang bertajuk *"Government Policy Strategies of Bandar Lampung City in Reducing School Dropout Rates"*. Riset ini didesain untuk membedah akar pemicu melonjaknya angka putus sekolah sekaligus merancang formula kebijakan pemerintah daerah dalam mengintervensi masalah tersebut. Berbasis pendekatan kualitatif, telaah kebijakan dalam studi ini dioperasikan menggunakan metode *Ultrasound Analysis* untuk menakar indikator urgensi, tingkat keseriusan, hingga potensi perluasan (eskalasi) masalah. Temuan di lapangan membuktikan bahwa desakan ekonomi rumah tangga, beban ongkos transportasi menuju fasilitas pendidikan, serta minimnya sokongan regulasi dari pemerintah menjadi biang keladi utama fenomena ini. Sebagai implikasinya, pemerintah daerah dituntut untuk melahirkan rumusan kebijakan yang lebih holistik dan berkesinambungan demi mereduksi rasio putus sekolah.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Eslamian dkk (2023) yang berjudul *"Scoping Review on Interventions, Actions, and Policies Affecting Return to School and Preventing School Dropout in Primary School."* Penelitian ini menggunakan metode scoping review dengan menelaah berbagai penelitian dan dokumen terkait intervensi serta kebijakan yang bertujuan mencegah siswa putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai intervensi seperti penguatan interaksi

²³ Khairani et al., 'Analisis Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah Di Tingkat SD Dan SMP Di Papua: Kajian Studi Pustaka Berbasis Teori Struktural', *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 45–51.

²⁴ Indah, 'Government Policy Strategies of Bandar Lampung City in Reducing School Dropout Rates', *Jurnal Kebijakan Publik* 16, no. 3 (2025): 251–258, <https://doi.org/10.31258/jkp.v16i3.8877>.

siswa dengan sekolah, kerja sama antara keluarga dan masyarakat, bantuan finansial, serta kebijakan pendidikan gratis dapat berkontribusi dalam menurunkan angka putus sekolah dan mendorong siswa kembali ke sekolah. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penanganan putus sekolah memerlukan kombinasi strategi kebijakan yang bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.²⁵

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang. Beberapa penelitian lebih menitikberatkan pada faktor penyebab terjadinya putus sekolah, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan, serta terbatasnya akses terhadap sarana prasarana pendidikan. Penelitian lain juga menyoroti upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah melalui berbagai program bantuan pendidikan dan kerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji kebijakan dan intervensi pendidikan secara lebih luas dalam mencegah terjadinya putus sekolah, baik pada tingkat nasional maupun dalam konteks internasional.

Walaupun demikian, dari penelitian-penelitian diatas umumnya hanya fokus pada faktor penyebab putus sekolah atau strategi pemerintah secara umum, sehingga kajian yang secara khusus meneliti strategi lembaga pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, dalam menangani anak tidak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu masih terbatas. Jadi, penelitian ini menempatkan diri pada kajian mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam menangani ATS tingkat SMP di Kabupaten Malang.

²⁵ Eslamian et al., 'Scoping Review on Interventions, Actions, and Policies Affecting Return to School and Preventing School Dropout in Primary School', *International Journal of Preventive Medicine* 14, no. 1 (2023): 92.

Table 1. 1 Orisinalitas Penelitian

No	Penulis dan judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Limbong, Purnomo, dan Halik (2025) Judul “Strategi Pemerintah Kota Sorong dalam Mengatasi Tantangan Anak Putus Sekolah”	Sama-sama membahas upaya atau strategi pemerintah dalam menangani permasalahan ATS	Penelitian tersebut berfokus pada strategi pemerintah daerah secara umum di Kota Sorong, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji strategi Dinas Pendidikan dalam penanganan ATS tingkat SMP di Kabupaten Malang.	Pada penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji secara spesifik strategi Dinas Pendidikan dalam menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Malang. Hal inilah yang menjadi sisi
2	Resta, Harisnawati, dan Akbar (2023) Judul “Strategi Mencegah Anak Putus Sekolah Dasar di Nagari Batu Bajanjang	Sama-sama mengkaji upaya pencegahan atau penanganan putus sekolah dalam bidang pendidikan	Penelitian tersebut berfokus pada pencegahan putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar, sedangkan disini penelitian berfokus pada penanganan Anak Tidak Sekolah pada jenjang SMP serta menitikberatkan	pembeda sekaligus kebaruan penelitian ini dibandingkan berbagai kajian terdahulu, yang umumnya hanya menyoroti fenomena putus sekolah sebatas pada analisis faktor penyebab atau strategi kebijakan

	Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok”		pada strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.	pemerintah secara makro di wilayah dan tingkat pendidikan yang berbeda. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi yang lebih tajam dengan berfokus langsung pada intervensi dan langkah praktis dari instansi pelaksana terkait.
3	Tri Puji Astuti (2024) Judul “Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan ”	Sama-sama menyoroti terkait penanganan Anak Tidak Sekolah oleh pemerintah daerah.	Penelitian tersebut menggunakan analisis SWOT untuk mengkaji strategi penanganan ATS di Kota Pekalongan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada strategi yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dalam penanganan ATS tingkat SMP di Kabupaten Malang.	
4	Aristin (2024) Judul“ Faktor-Faktor yang Berpengaru	Sama-sama membahas permasalahan putus sekolah pada tingkat SMP.	Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis faktor penyebab putus sekolah, sedangkan penelitian ini	

	h terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat SMP di Kecamatan Bondowoso ”		berfokus pada strategi pemerintah daerah dalam menangani Anak Tidak Sekolah pada tingkat SMP.	
5	Khairani, Hakiki, dan Yopan (2025) Judul “Analisis Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah di Tingkat SD dan SMP di Papua”	Sama-sama membahas fenomena putus sekolah dalam sistem pendidikan.	Penelitian tersebut mengkaji faktor penyebab putus sekolah melalui studi pustaka, sedangkan penelitian ini mengkaji strategi penanganan ATS secara langsung oleh Dinas Pendidikan pada tingkat daerah.	

F. Definisi Istilah

Definisi operasional digunakan untuk memberikan batasan konseptual juga operasional pada istilah-istilah utama yang dipergunakan dalam penelitian.²⁶ Hal ini bertujuan agar setiap konsep yang digunakan memiliki makna yang jelas serta dapat dipahami secara konsisten sesuai dengan fokus kajian penelitian. Adapun istilah-istilah yang dimaksud pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi

Secara konseptual, strategi dipahami sebagai akumulasi dari rancangan dan manuver yang dikonstruksi secara terstruktur guna mewujudkan target spesifik di dalam sebuah institusi maupun kerangka kebijakan. Lebih dari sekadar cetak biru perencanaan semata, spektrum strategi turut mencakup tahapan formulasi tujuan, penetapan keputusan krusial, hingga eksekusi langkah-langkah taktis yang dinilai paling mumpuni untuk merealisasikan target yang telah dicanangkan. Menurut Fred R. David, strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan yang terarah dan pengelolaan sumber daya secara efektif.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, strategi dimaknai sebagai berbagai kebijakan, program, serta langkah-langkah yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah pada jenjang SMP di Kabupaten Malang.

²⁶ Werner Ria Murhadi, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Ekuitas Publisher, 2025), hal 6.

²⁷ Fred R. David, *Strategic Management Concepts and Cases* (Prentice hall, 2011), hal 5.

2. Dinas Pendidikan

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, Dinas Pendidikan memegang mandat penuh selaku pemangku otoritas dalam mengelola roda penyelenggaraan urusan pendidikan pada level regional. Koridor tanggung jawab dari instansi ini mencakup proses formulasi regulasi pendidikan di daerah, eksekusi program-program strategis, hingga pelaksanaan fungsi supervisi dan pembinaan berkelanjutan terhadap seluruh elemen satuan pendidikan yang berada di bawah naungannya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²⁸ Pada penelitian ini, Dinas Pendidikan yang di maksud adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagai institusi yang memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah.

3. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah kelompok anak dalam rentang usia wajib belajar yang saat ini tidak berpartisipasi di dalam institusi pendidikan, baik melalui skema formal ataupun nonformal. Di dalam lanskap regulasi pendidikan nasional, klasifikasi ATS dipecah ke dalam tiga kategori utama: individu yang sama sekali belum pernah menduduki bangku sekolah, peserta didik yang terpaksa berhenti atau putus sekolah di tengah jalan sebelum menamatkan tahapan belajarnya, serta mereka yang berhasil lulus dari suatu

²⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 Ayat (1).*

tingkatan namun urung meneruskan studi ke jenjang selanjutnya. Definisi konseptual ini secara resmi diaplikasikan di dalam mekanisme pendataan terpadu yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya melalui kerangka sistem verifikasi dan validasi (Verval) Anak Tidak Sekolah.²⁹ Dalam konteks penelitian ini, parameter Anak Tidak Sekolah (ATS) dikerucutkan secara spesifik pada kelompok usia wajib belajar yang secara normatif semestinya menduduki bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan ruang lingkup teritorial di kawasan Kabupaten Malang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penelitian ini disesuaikan dengan Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang.³⁰ Sebagai gambaran umum tentang alur pembahasan yang terdapat dalam masing-masing bab sehingga dapat memudahkan pembaca saat menelaah isi penelitian secara menyeluruh. Proposal Penelitian ini dirangkai ke dalam tiga bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab I bertindak sebagai pendahuluan yang menyajikan orientasi awal terkait studi yang dijalankan. Bagian ini membedah latar belakang masalah guna menegaskan urgensi riset, menetapkan rumusan masalah sebagai titik tumpu investigasi, memformulasikan capaian tujuan yang hendak direalisasikan, serta menguraikan signifikansi penelitian baik pada tataran teoretis maupun praktis. Lebih lanjut, bab ini turut mengakomodasi pemaparan ihwal orisinalitas riset,

²⁹ Kemendikdasmen, 'Data Anak Tidak Sekolah (ATS).

³⁰ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024).

batasan definisi operasional guna mencegah ambiguitas terminologi utama, serta kerangka sistematika penulisan yang merepresentasikan alur struktural dari penyusunan karya ilmiah ini.

Bab II menyajikan tinjauan pustaka yang memuat kerangka teoretis sebagai fondasi analitis dalam membedah problematika riset. Pada bagian ini, diuraikan serangkaian konsep dan teori yang memiliki relevansi erat dengan fokus studi, meliputi konseptualisasi strategi pada kebijakan pendidikan, definisi Anak Tidak Sekolah (ATS), ragam determinan pemicu munculnya fenomena ATS, hingga signifikansi peran pemerintah daerah dalam tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Sebagai pelengkap, bab ini turut memaparkan skema kerangka berpikir yang merepresentasikan konstruksi hubungan antar-konsep fundamental yang diaplikasikan di dalam penelitian.

Bab III menguraikan rancangan metodologi yang diaplikasikan di dalam studi ini. Bagian ini menjabarkan secara komprehensif terkait pendekatan dan jenis riset, penetapan lokus kajian, spesifikasi sumber data, instrumen penggalan informasi, hingga prosedur analisis yang dioperasikan guna memproses sekaligus menginterpretasikan temuan lapangan. Kerangka metodologis tersebut dikonstruksi untuk mendeskripsikan tahapan prosedural yang ditempuh peneliti saat menghimpun dan membedah data spesifik mengenai manuver Dinas Pendidikan dalam menanggulangi problematika Anak Tidak Sekolah (ATS).

Bab IV merupakan bab yang berisi paparan data dan hasil penelitian. Pada bab ini, peneliti menyajikan secara sistematis temuan-temuan penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

Bab V merupakan bab yang berisi pembahasan atas temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pada bab ini, peneliti menganalisis, menginterpretasikan, dan mendiskusikan temuan-temuan lapangan mengenai strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang SMP. Pembahasan tersebut dilakukan secara mendalam dengan mengaitkannya pada landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada Bab II.

Bab VI merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, khususnya dalam upaya penanganan Anak Tidak Sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Strategi

Konsep strategi menduduki posisi krusial di dalam diskursus manajemen dan organisasi, khususnya yang bersinggungan dengan manuver terstruktur guna merealisasikan target spesifik lewat perencanaan yang sistematis. Pada konteks kelembagaan, strategi bertindak sebagai kompas pemandu dalam memformulasikan tindakan taktis untuk mencapai sasaran yang telah dicanangkan secara optimal dan berdaya guna. Sebagai implikasinya, esensi strategi melampaui batas-batas perencanaan administratif semata tetapi spektrumnya turut merangkul siklus krusial pengambilan keputusan dalam menetapkan orientasi serta langkah konkret organisasi saat mengonfrontasi ragam dinamika tantangan.

Menurut Sondang P. Siagian, strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara operasional, strategi merepresentasikan pendekatan paling ideal yang diadopsi oleh sebuah entitas kelembagaan untuk mengkapitalisasi seluruh sumber daya yang tersedia, sekaligus beradaptasi terhadap dinamika lingkungan internal maupun eksternalnya. Melalui mekanisme tersebut, kerangka strategis ini bertindak sebagai kompas penuntun bagi organisasi dalam memformulasikan manuver yang presisi, sehingga realisasi target bisa dicapai dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang maksimal.³¹

³¹ Sondang P. Siagian, 'Manajemen Strategik, Bumi Aksara', Jakarta, 2000, hal 16.

Sementara itu, Fred R. David menerangkan strategi sebagai sarana untuk menggapai tujuan jangka panjang organisasi. Dalam perspektif ini, strategi tidak hanya berkaitan dengan perencanaan, tetapi juga meliputi proses implementasi dan evaluasi.³² Secara umum tahapan strategi dijabarkan dalam tiga poin utama sebagai berikut:

1. Perumusan/perencanaan strategi

Perumusan strategi merupakan tahap pertama dalam proses strategi yang berkaitan dengan penentuan tujuan organisasi serta perancangan langkah-langkah yang akan dijalankan untuk menggapai tujuan tersebut. Pada tahap ini organisasi melakukan analisis terhadap berbagai kondisi yang berdampak pada organisasi, baik kondisi internal maupun eksternal, sehingga bisa dirumuskan strategi yang pas untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.³³

2. Implementasi strategi

Implementasi strategi adalah tahap penerapan dari strategi yang telah dirancang sebelum ini. Fase ini berkaitan dengan upaya organisasi dalam menerapkan berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi strategi melibatkan berbagai unsur dalam organisasi, termasuk pengalokasian sumber daya, pelaksanaan program kerja, serta koordinasi antar unit organisasi agar strategi dapat berjalan dengan efektif.

3. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi adalah tahapan penilaian terhadap realisasi strategi yang sudah dilakukan oleh organisasi. Pada fase ini dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan strategi yang telah diterapkan serta identifikasi berbagai kendala

³² Fred R. David, *Strategic Management Concepts and Cases* (Prentice hall, 2011), hal 6.

³³ Fred R. David, *Strategic Management Concepts and Cases* (Prentice hall, 2011).

yang muncul selama proses pelaksanaan strategi. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat dipakai sebagai pondasi untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan strategi pada tahap berikutnya.

Berdasarkan ragam definisi di atas, esensi strategi dapat dikonseptualisasikan sebagai akumulasi rancangan dan langkah taktis yang dikonstruksi secara terstruktur oleh sebuah entitas guna mengoptimalkan utilisasi sumber daya demi tercapainya sasaran spesifik. Dalam bingkai studi ini, pendekatan strategis tersebut difungsikan sebagai landasan analitis untuk membedah manuver serta intervensi Dinas Pendidikan dalam menanggulangi problematika Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang SMP di kawasan Kabupaten Malang

B. Anak tidak sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) ialah salah satu indikator penting dalam melihat tingkat pemerataan akses pendidikan dalam suatu negara. Keberadaan anak yang tidak memperoleh layanan pendidikan menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakmerataan pada sistem pendidikan, baik yang disebabkan oleh faktor struktural, sosial, maupun ekonomi. Permasalahan ini tidak hanya bersangkutan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan, tapi juga bersangkutan dengan berbagai kondisi yang mempengaruhi keberlangsungan pendidikan anak, seperti kemampuan ekonomi keluarga, dukungan lingkungan sosial, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.³⁴ Fenomena Anak Tidak Sekolah menjadi perhatian penting dalam kebijakan pembangunan pendidikan karena berkaitan

³⁴ Lanawaang and Mesra, *Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kelurahan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, Dan 3 UUD 1945*, hal 1379.

langsung dengan upaya pemerintah memastikan pemenuhan hak konstitusional bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

Istilah Anak Tidak Sekolah digunakan untuk menggambarkan anak yang berada pada usia sekolah tetapi tidak sedang mengikuti proses pendidikan pada satuan pendidikan formal maupun nonformal. Pengertian ini digunakan dalam sistem pendataan pendidikan nasional yang dikemungkinan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memetakan kondisi akses pendidikan masyarakat.³⁵ Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui angka anak usia sekolah yang tidak terdaftar sebagai peserta didik dalam sistem pendidikan, sehingga pemerintah dapat merumuskan berbagai kebijakan dan program intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan.

Sistem pendataan pendidikan di Indonesia mengklasifikasikan Anak Tidak Sekolah ke dalam beberapa kategori berdasarkan riwayat pendidikan yang dimiliki oleh anak. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses identifikasi serta penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Anak Tidak Sekolah secara umum dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu anak drop out (DO), anak belum pernah bersekolah (BPB), dan anak lulus tidak melanjutkan (LTM). Ketiga kategori tersebut menunjukkan kondisi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda pula dalam kebijakan pendidikan.³⁶

Kategori drop out (DO) merujuk pada anak yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan di sekolah tetapi kemudian berhenti sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh

³⁵ Kemendikdasmen, *Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)*, diakses 14 Maret 2026.

³⁶ Kemendikdasmen, *Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)*, diakses 14 Maret 2026.

berbagai penyebab seperti keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya semangat belajar, maupun kondisi lingkungan sosial yang kurang mendukung keberlangsungan pendidikan.³⁷ Anak yang mengalami putus sekolah berpotensi mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan apabila tidak terdapat intervensi kebijakan yang mampu mengembalikan mereka ke dalam sistem pendidikan.

Kategori belum pernah bersekolah (BPB) merujuk pada anak yang berada pada usia sekolah tetapi belum pernah mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan formal. Kondisi ini umumnya berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan, kondisi keluarga yang tidak mencukupi, maupun sosial budaya yang mempengaruhi keputusan keluarga untuk tidak menyekolahkan anak.³⁸ Keberadaan anak yang belum pernah bersekolah menjelaskan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak sepenuhnya memperoleh kesempatan untuk mengakses layanan pendidikan dasar.

Sementara itu, klasifikasi Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) disematkan pada kelompok anak yang sejatinya telah berhasil menamatkan suatu tingkatan pendidikan, namun proses akademiknya terhenti lantaran tidak meneruskan studi ke jenjang lanjutan.³⁹ Fenomena semacam ini paling rentan muncul pada fase transisi pendidikan, semisal saat pergantian dari jenjang Sekolah Dasar (SD) ke SMP maupun dari SMP menuju SMA. Mandeknya proses belajar ini umumnya dilatarbelakangi oleh beberapa determinan krusial, di antaranya impitan finansial

³⁷ Dayana et al., 'Analisis Faktor Ekonomi Terhadap Tingkat Drop Out Siswa Di Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong' (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/8055/>.

³⁸ Lanawaang and Mesra, *Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kelurahan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, Dan 3 UUD 1945*, hal 1379.

³⁹ Kemendikdasmen, *Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)*, diakses 14 Maret 2026.

rumah tangga, minimnya ketersediaan atau daya jangkau terhadap institusi pendidikan lanjutan, hingga lemahnya dorongan internal anak untuk meneruskan studinya.

Permasalahan Anak Tidak Sekolah memiliki implikasi yang cukup luas terhadap pembangunan sumber daya manusia. Anak yang tidak memperoleh akses pendidikan berpotensi mengalami keterbatasan dalam pengembangan kemampuan akademik maupun keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia serta memperbesar kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kesenjangan sosial ini menciptakan jurang yang dalam diantara mereka yang memiliki akses pendidikan dan mereka yang tidak.⁴⁰ Jadi, penanganan Anak Tidak Sekolah adalah suatu bagian penting dalam kebijakan pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan serta menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

Fokus penelitian ini diarahkan pada Anak Tidak Sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Malang. Jenjang pendidikan tersebut memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan karena merupakan tahap transisi dari pendidikan dasar menuju pendidikan menengah. Keberhasilan mempertahankan anak tetap bersekolah pada jenjang ini memiliki peran penting dalam mencegah meningkatnya jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya. Kondisi tersebut menjadikan penanganan Anak Tidak Sekolah pada tingkat SMP sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan pendidikan

⁴⁰ I. Ketut Sukarma et al., 'Mengurangi Ketimpangan Sosial Melalui Program Bantuan Pendidikan Bagi Anak-Anak Kurang Mampu', *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2023): 8441.

daerah, khususnya melalui strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

C. Prespektif Teori dalam Islam

Pendidikan dalam pandangan Islam menduduki posisi sentral sebagai instrumen untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan menuju peradaban yang beradab. Pada konteks fenomena Anak Tidak Sekolah, tingginya angka putus sekolah tidak hanya dipandang sebagai masalah administratif, melainkan masalah struktural yang berdampak pada keberlangsungan kualitas umat. Oleh karena itu, strategi penanganan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan sejatinya merupakan manifestasi dari implementasi nilai-nilai keislaman dalam ranah kebijakan publik. Secara teoretis, hal ini dapat ditelaah melalui empat landasan utama:

1. Kewajiban Menuntut Ilmu (*Tholabul 'Ilmi*)

Pendidikan dalam Islam bukanlah sekadar hak sosial yang bersifat opsional, melainkan sebuah kewajiban mutlak (*fardhu*) bagi setiap individu.

Hal ini secara tegas dilandaskan pada sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan..." (H.R. Ibn Majah)⁴¹

Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, perolehan ilmu pengetahuan merupakan fondasi utama bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia. Bagi anak usia sekolah, pendidikan dasar dan menengah

⁴¹ HR. Ibnu Majah, No. 224

adalah fase pembentukan rasionalitas dan moralitas. Terjadinya fenomena ATS menandakan adanya disrupsi atau terhambatnya proses pemenuhan kewajiban agama tersebut. Oleh karenanya, intervensi Dinas Pendidikan dalam mengembalikan ATS ke satuan pendidikan adalah bentuk optimalisasi peran negara untuk memfasilitasi warganya agar tetap berada pada jalur tholabul 'ilmi. Tanpa adanya strategi holistik dari pemerintah, kewajiban kolektif untuk mencerdaskan kehidupan umat akan terabaikan, yang berdampak pada regresi (kemunduran) intelektual di masyarakat.⁴²

2. Tanggung Jawab Pemimpin (*Al-Mas'uliyah*)

Dalam kerangka Siyasah Syar'iyah (tata kelola pemerintahan Islam), kedudukan aparatur negara adalah sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*). Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin bagi harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya.

⁴² Irsyad Zamjani, dkk., "Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar: Studi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, Vol. 11, No. 2 (2018), hlm. 45.

Maka, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya'." (HR. Bukhari).⁴³

Berdasarkan hadis di atas, titik tekan berada pada frasa "*Al-imaamu raa'in wa mas'uulun 'an ra'iyatihi*" menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan sebagai pemangku kebijakan publik tingkat daerah memikul tanggung jawab penuh terhadap akses pendidikan masyarakat. Kebijakan untuk menangani masalah putus sekolah merupakan implementasi nyata dari kaidah fikih fundamental yang berbunyi: "*Tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*" (Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa didasarkan pada prinsip kemaslahatan).⁴⁴ Dengan demikian, strategi Dinas Pendidikan dalam mendata, menjangkau, serta memberikan bantuan afirmasi bagi ATS adalah bentuk tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penciptaan kesejahteraan umum (*maslahah mursalah*) demi memastikan tidak ada warga negara yang terpinggirkan dari layanan pendidikan.⁴⁵

3. Pencegahan Generasi yang Lemah

Islam menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masa depan dan kualitas keberlanjutan generasi penerus. Allah SWT memberikan peringatan tegas melalui firman-Nya, (QS. An-Nisa: 9):

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

⁴³ HR Imam Bukhari no. 893, 2554, 7138 dan Imam Muslim no. 1829

⁴⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, (Kairo: Dar al-Salam, 2004), hlm. 121.

⁴⁵ Abdul Malik, "Implementasi Manajemen Pendidikan Islam dalam Kebijakan Publik", *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 115

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).⁴⁶

Istilah "lemah" (*dhu'afa*) dalam ayat tersebut memiliki cakupan multidimensi, yakni kelemahan secara intelektual, spiritual, maupun ekonomi. Menurut kajian sosiologi pendidikan, masalah putus sekolah merupakan embrio dari lahirnya kemiskinan struktural. Anak yang tidak mengenyam pendidikan memadai cenderung memiliki daya saing yang rendah dalam menghadapi mobilitas sosial dan tantangan zaman. Strategi komprehensif dari Dinas Pendidikan dalam menanggulangi ATS bertindak sebagai instrumen preventif (*sadd al-dzari'ah*) untuk mencegah meluasnya rantai kemiskinan dan keterbelakangan. Kebijakan ini adalah langkah antisipatif untuk mencetak *khaira ummah* (generasi terbaik) yang kuat dan mandiri di masa depan.⁴⁷

4. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Agama Islam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (*al-musawah*) dan keadilan sosial dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kedalam pemerataan hak-hak dasar. Firman Allah pada Al.Qur'an, QS. An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 78.

⁴⁷ Rohmatul Anisah Muiz, dkk., "Kebijakan Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Kualitas, Kuantitas, Efektivitas dan Efisiensi", *Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 12-15.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁴⁸

Keadilan pendidikan bermakna bahwa setiap warga negara tanpa memandang strata sosial, gender, maupun kondisi ekonomi keluarga berhak mendapatkan akses pembelajaran yang setara dan bermutu. Mengingat mayoritas kasus ATS dipicu oleh ketimpangan faktor ekonomi keluarga menengah ke bawah, kehadiran Dinas Pendidikan melalui program afirmasi wajib belajar berfungsi sebagai katalisator pemerataan. Strategi kebijakan pendidikan yang inklusif merupakan instrumen keadilan negara dalam memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap kaum *mustad'afin* (kelompok rentan dan lemah). Hal ini sekaligus membuka ruang bagi terjadinya mobilitas sosial vertikal melalui pendidikan, sehingga kemiskinan tidak menjadi hambatan permanen bagi seorang anak untuk meraih masa depannya.⁴⁹

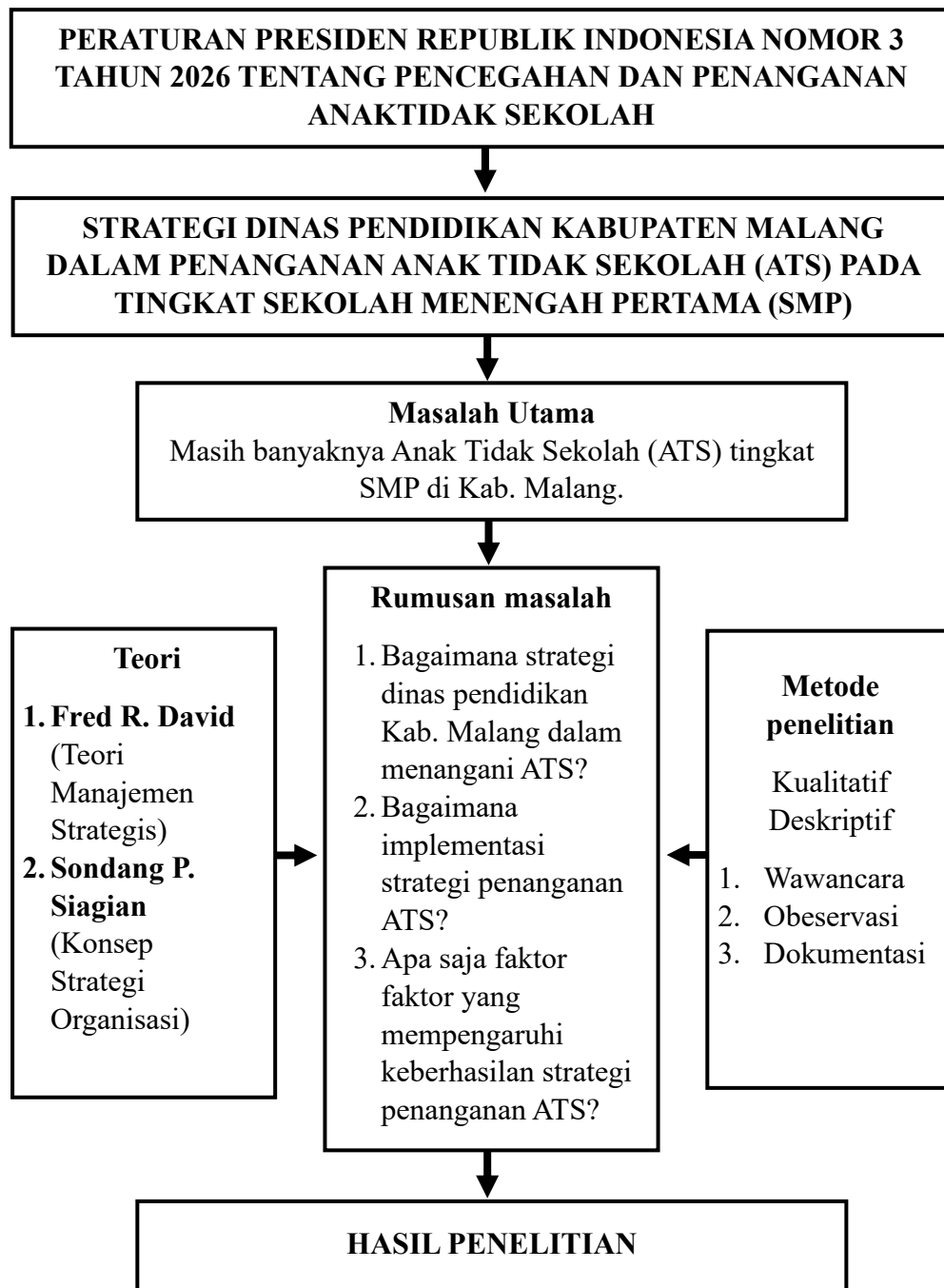
Secara teoretis, strategi Dinas Pendidikan dalam menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan manifestasi dari implementasi nilai-nilai Islam yang memandang pendidikan sebagai hak fundamental sekaligus kewajiban religius. Melalui pemenuhan tanggung jawab kepemimpinan dan penerapan kebijakan berbasis kemaslahatan upaya ini tidak hanya bertujuan menuntaskan wajib belajar secara administratif, namun juga sebagai langkah preventif dalam melindungi generasi muda dari kelemahan intelektual dan ekonomi. Dengan demikian,

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 277.

⁴⁹ A. Rahman, "Pendidikan dan Mobilitas Vertikal dalam Perspektif Islam: Peran Pendidikan dalam Transformasi Status Sosial Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 4 (2021), hlm. 301.

penanggulangan ATS merupakan manifestasi dari prinsip keadilan sosial yang diharapkan dapat melahirkan generasi yang kuat, mandiri, dan bermartabat sesuai dengan cita-cita pendidikan Islam.

D. Kerangka berfikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan tersebut dilandasi oleh tujuan riset untuk membedah secara holistik fenomena sosial seputar langkah strategis Dinas Pendidikan dalam menanggulangi isu Anak Tidak Sekolah (ATS). Implementasi metode ini memfasilitasi peneliti dalam mengekstraksi pemahaman yang utuh terkait konstelasi kebijakan, program intervensi, serta ragam determinan yang mendikte jalannya penanganan ATS di tengah masyarakat. Lebih lanjut, desain kualitatif membuka ruang bagi peneliti untuk menyelami konstruksi realitas empiris dari kacamata para aktor yang berpartisipasi langsung dalam roda eksekusi kebijakan pendidikan.⁵⁰

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah studi kasus. Penelitian studi kasus memiliki tujuan untuk mengkaji secara mendalam suatu fenomena atau peristiwa dalam konteks tertentu sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek yang diteliti. Dengan jenis penelitian ini, peneliti dapat menelaah secara lebih rinci mengenai strategi yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dalam menangani Anak Tidak Sekolah, termasuk proses perumusan kebijakan, implementasi program, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

⁵⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2019), hal 6.

B. Kehadiran Peneliti

Di dalam kerangka riset kualitatif, eksistensi peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci (*human instrument*) selama tahapan pengumpulan data. Peneliti berpartisipasi secara proaktif dalam upaya ekstraksi informasi, baik melalui mekanisme pengamatan langsung, wawancara mendalam, maupun telaah arsip yang relevan dengan lokus studi. Kehadiran fisik peneliti di lapangan merupakan elemen krusial guna menyingkap makna esensial di balik konstelasi fenomena yang tengah diamati. Oleh karenanya, pada koridor metodologi ini, instrumen penelitian tidak direduksi sebatas peranti teknis semata, melainkan sangat bertumpu pada kompetensi analitis peneliti dalam melakukan observasi tajam, menginterpretasikan makna, serta mengonstruksi analisis komprehensif terhadap temuan empiris.⁵¹

Dalam studi ini, peneliti mengambil posisi sebagai pengamat partisipan (*participant observer*). Peneliti terjun langsung ke lokus kajian guna mengobservasi secara faktual roda eksekusi dari serangkaian strategi Dinas Pendidikan dalam mengentaskan problematika Anak Tidak Sekolah (ATS), sekaligus menggali keterangan mendalam dari para informan kunci. Keterlibatan peneliti di lapangan bersifat transparan dan telah diketahui sepenuhnya oleh pihak-pihak yang diwawancarai (*overt research*), sehingga agenda ekstraksi data dapat berlangsung secara terbuka serta selaras dengan orientasi tujuan riset.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada perhitungan bahwa instansi tersebut merupakan lembaga pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan dalam

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 168.

merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten, termasuk dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS). Melalui penelitian yang dilakukan di instansi ini, peneliti diharapkan bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah.

Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah mempunyai kewajiban dalam penyeleggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pendidikan di wilayah daerah.⁵² Keberadaan lembaga ini menjadi sangat penting dalam upaya memperbaiki akses pendidikan bagi masyarakat serta menurunkan angka Anak Tidak Sekolah melalui berbagai program dan kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah pihak-pihak yang dijadikan sumber utama untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dipilih secara purposive, yakni didasarkan perhitungan tertentu yang dianggap sanggup memberikan informasi yang relevan dan terperinci mengenai permasalahan yang diteliti.⁵³ Subjek dalam kajian ini adalah seluruh pihak yang terlibat secara langsung pada pelaksanaan kebijakan pendidikan, terkhusus dalam penanganan Anak Tidak Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Narasumber penelitian terdiri dari pejabat atau staf

⁵² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 12.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal 218.

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang memiliki kewenangan atau keterlibatan dalam program penanganan Anak Tidak Sekolah, seperti kepala bidang yang menangani pendidikan dasar, staf yang bertanggung jawab dalam pendataan Anak Tidak Sekolah, serta pihak lain yang dianggap mempunyai informasi yang relevan dengan penelitian. Melalui subjek penelitian tersebut, peneliti berharap dapat memperoleh data yang komprehensif tentang strategi yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah.

E. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai pada penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi yang bersangkutan dengan kebijakan dan program penanganan Anak Tidak Sekolah. Sumber data didalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.⁵⁴

Data utama di dalam kajian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program penanganan Anak Tidak Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, seperti kepala bidang yang menangani pendidikan dasar, staf yang bertanggung jawab terhadap pendataan Anak Tidak Sekolah, serta pihak lain yang dirasa mempunyai informasi yang relevan dengan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

⁵⁴ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, 'Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier', *Edu Research* 5, no. 3 (2024): hal 111, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

Sumber data sekunder ialah data yang didapatkan dari berbagai dokumen yang memperkuat penelitian.⁵⁵ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi laporan program pendidikan, data Anak Tidak Sekolah, peraturan atau kebijakan pendidikan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan upaya penanganan Anak Tidak Sekolah yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk membantu pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, alat utamanya ialah peneliti itu sendiri. Hal ini karena penelitalah yang turun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengolah data tersebut. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti akan melakukan pengamatan (observasi), wawancara, dan memeriksa dokumen-dokumen yang ada. Oleh karena itu, sukses tidaknya sebuah penelitian kualitatif sangat bergantung pada kepekaan peneliti dalam membaca situasi, kemampuannya menggali informasi dari narasumber, serta ketajamannya dalam menganalisis semua data yang ditemukan.⁵⁶

Selain peneliti sebagai pengumpul data utama, penelitian ini juga menggunakan beberapa alat bantu pendukung. Alat bantu tersebut di antaranya adalah pedoman wawancara agar pertanyaan kepada narasumber lebih terarah, lembar observasi untuk mencatat hal penting yang dilihat di lapangan, serta alat dokumentasi seperti alat perekam suara, kamera, dan buku catatan.

⁵⁵ Sulung and Muspawi, 'Memahami Sumber Data Penelitian', hal 111.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mengidentifikasi dan menyeleksi individu yang bakal dijadikan subjek penelitian, memperoleh izin untuk melaksanakan penelitian, serta mengumpulkan informasi melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kepada informan atau melalui pengamatan terhadap perilaku mereka. Proses ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan fokus penelitian sehingga dapat digunakan dalam proses analisis penelitian.⁵⁷

1. Observasi

Observasi (pengamatan) dilakukan dengan cara melihat langsung berbagai kegiatan dan kondisi yang berkaitan dengan upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Lewat pengamatan langsung ini, peneliti bisa mendapatkan gambaran nyata mengenai situasi yang ada, bagaimana jalannya program tersebut, serta kejadian-kejadian riil di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan bertujuan mendapatkan informasi secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara agar proses penggalian informasi tetap terarah, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan informasi secara lebih luas. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi

⁵⁷ Hidayat et al., 'Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data Dan Penyimpulan/Pemaknaan, Dan Pelaporan & Evaluasi Penelitian', *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 519, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.509>.

Muthoharoh, S.M. (Kepala Seksi Kesiswaan SMP), Dewi Ruhillah, S.Pd. (Kepala Seksi PAUD), dan Nila Mayasari (Pengadministrasi Perkantoran).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti data Anak Tidak Sekolah, laporan program pendidikan, peraturan atau kebijakan pendidikan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, serta menafsirkan data yang telah diperoleh dari lapangan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data sudah mulai dilakukan semenjak tahap awal pengumpulan data hingga seluruh kegiatan penelitian selesai. Tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk memahami makna di balik informasi yang didapat, sekaligus menemukan berbagai hal atau temuan penting yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.⁵⁹ Model analisis ini terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, yaitu sebagai berikut:

⁵⁸ Fahriana Nurrisa and Dina Hermina, 'Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data', *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629 2, no. 3 (2025): hal 798.

⁵⁹ Nurrisa and Hermina, 'Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian', hal 798.

1. Reduksi Data

Reduksi data pada dasarnya adalah proses menyaring dan menyederhanakan semua informasi yang sudah dikumpulkan dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti akan memilah mana data yang benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian, lalu merangkum poin-poin penting seputar strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam mengatasi masalah Anak Tidak Sekolah (ATS).

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahapan merapikan dan menampilkan data yang sudah disaring sebelumnya. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian cerita (narasi), tabel, maupun bagan. Tujuannya adalah agar peneliti lebih mudah memahami kaitan antar informasi yang ada, sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan jelas mengenai masalah yang sedang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang sudah diolah untuk mencari makna, sekaligus menjawab pertanyaan utama dari penelitian. Kesimpulan yang didapatkan ini kemudian akan terus dicek ulang (diverifikasi) selama penelitian berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil akhir penelitian tersebut benar-benar tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

I. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang didapat dari penelitian benar-benar valid dan bisa dipercaya (kredibel). Dalam penelitian kualitatif, salah satu cara yang sering digunakan untuk menguji

kebenaran data ini adalah melalui teknik triangulasi. Singkatnya, triangulasi adalah upaya mengecek silang atau mencocokkan sebuah data dengan cara membandingkannya menggunakan sumber, metode, atau informasi lain sebagai bahan pembuktian.

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan melewati beberapa bentuk triangulasi, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda. Data yang diperoleh dari satu informan akan dibandingkan dengan informasi dari informan lain untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data yang diperoleh.⁶⁰

2. Triangulasi Teknik atau Metode

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data dan informasi yang didapat melalui macam-macam teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶¹ Dengan cara ini peneliti dapat melihat konsistensi data yang di peroleh dari teknik yang berbeda.

Melalui penerapan triangulasi sumber data, triangulasi teknik atau metode, peneliti berupaya memverifikasi bahwasanya data yang diperoleh memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang tinggi. Penggunaan berbagai teknik pengecekan tersebut diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

⁶⁰ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., 'Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.

⁶¹ Dedi Susanto and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil dinas pendidikan kabupaten Malang

Nama Instansi	Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
Status Instansi	Perangkat Daerah Kabupaten Malang
Bidang Urusan	Pendidikan
Dasar Hukum	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Malang tentang Organisasi Perangkat Daerah
Alamat	Jl. Panarukan No. 1, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163
Kode Pos	65163
Pimpinan	Suwadji, S.IP., M.Si.
Wilayah Kerja	Kabupaten Malang
Kedudukan	Unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan berkedudukan di Kecamatan Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang dan bertanggung jawab kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah.⁶² Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan memiliki fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan

⁶² IDalamat.com, 'Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang', IDalamat.com, accessed 12 June 2026, <https://idalamat.com/alamat/12535/kantor-dinas-pendidikan-kabupaten-malang>.

khususnya pada Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Bidang ini memiliki tugas dalam mengelola layanan pendidikan nonformal dan pendidikan kesetaraan yang menjadi salah satu alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Oleh karena itu, Bidang PAUD dan Dikmas memiliki peran penting dalam pelaksanaan program penanganan ATS di Kabupaten Malang.

Peran Bidang PAUD dan Dikmas dalam penanganan ATS tidak hanya terbatas pada pendataan anak yang tidak bersekolah, tetapi juga meliputi proses verifikasi dan validasi data ATS yang diperoleh dari berbagai sumber. Setelah data diverifikasi, bidang ini melakukan koordinasi dengan sekolah, pemerintah desa, satuan pendidikan nonformal, serta pihak terkait lainnya untuk menentukan bentuk layanan pendidikan yang sesuai bagi setiap anak. Melalui mekanisme tersebut, anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah dapat diarahkan kembali ke pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan ATS, Bidang PAUD dan Dikmas menjadi bagian yang sangat relevan dalam penelitian ini. Hal tersebut karena berbagai strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam menangani Anak Tidak Sekolah, mulai dari proses pendataan, penjangkauan, pendampingan, hingga pengembalian anak ke layanan pendidikan, sebagian besar dilaksanakan melalui koordinasi Bidang PAUD dan Dikmas bersama berbagai pihak terkait.

B. Paparan Data

1. Perencanaan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) Tingkat SMP

Perencanaan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Malang memperlihatkan konstruksi kebijakan pendidikan yang bergerak dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis data dan kolaborasi kelembagaan. Perencanaan tidak dapat dipahami sebagai tahapan teknis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses siklis yang dimulai dari identifikasi masalah, validasi data, analisis situasi, hingga perumusan arah kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam konteks ini, ATS tidak hanya diposisikan sebagai data statistik pendidikan, tetapi sebagai fenomena sosial yang membutuhkan intervensi lintas sektor. Pola tersebut menunjukkan bahwa strategi dinas dibentuk melalui interaksi antara realitas lapangan, sistem informasi digital, serta kerangka regulasi nasional.

a. Proses perencanaan strategi berbasis identifikasi masalah dan transformasi kesadaran kebijakan

Perencanaan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Malang menunjukkan adanya transformasi cara pandang institusi pendidikan dalam membaca persoalan pendidikan dari yang semula bersifat administratif menjadi lebih kompleks sebagai persoalan sosial yang membutuhkan intervensi kebijakan berbasis data. Transformasi ini tidak muncul secara spontan, melainkan melalui proses refleksi kelembagaan setelah data ATS menunjukkan angka yang cukup tinggi dan tersebar pada berbagai kelompok usia. Dalam konteks ini, data tidak hanya berfungsi

sebagai informasi pendukung, tetapi menjadi pemicu utama lahirnya kesadaran institusional terhadap urgensi penanganan ATS secara lebih terstruktur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di tingkat daerah tidak selalu dimulai dari formulasi problem sosial secara kualitatif, tetapi sering kali diawali dari keterlihatan masalah dalam bentuk angka dan sistem klasifikasi. ATS baru memperoleh perhatian serius ketika telah masuk ke dalam sistem pendataan yang mampu memetakan besaran dan sebaran kasus secara jelas. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktik birokrasi pendidikan, masalah sosial baru memperoleh status “prioritas kebijakan” ketika telah terobjektifikasi dalam bentuk data yang dapat diolah.

Hal ini ditegaskan oleh Kasi SMP yang menjelaskan bahwa fokus awal dinas bukan pada penyusunan strategi penanganan, melainkan pada proses pemetaan data terlebih dahulu sebelum kebijakan dirumuskan:

“Jadi sebelum ada program Saber ATS ini, sebenarnya kami belum terlalu fokus pada penanganan ATS secara khusus. Waktu itu fokus kami masih pada pendataan dulu, karena kami perlu mengetahui sebenarnya jumlah ATS di Kabupaten Malang itu berapa. Setelah pendataannya selesai dan ternyata prevalensinya cukup tinggi, akhirnya kami mengadakan rapat bersama. Semua bidang kami libatkan untuk merumuskan strategi dan program yang bisa digunakan untuk menangani ATS ini.”⁶³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lahirnya strategi penanganan ATS merupakan hasil dari proses institusional yang berbasis pada “kesadaran statistik” terhadap masalah pendidikan. Kebijakan tidak muncul dari satu gagasan awal yang matang, melainkan dari proses adaptif terhadap data yang

⁶³ Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’, (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 09.00.

menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem pendidikan.⁶⁴ Dalam konteks ini, data tidak hanya berperan sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai mekanisme yang membentuk agenda kebijakan.

Proses tersebut diperkuat oleh penjelasan Ketua seksi PAUD yang menekankan bahwa seluruh tahapan perencanaan selalu diawali dengan pembacaan data dari *Dashboard* ATS sebelum masuk ke tahap pembahasan lintas bidang:

“Kalau dari bidang kami, proses perencanaan biasanya diawali dengan melihat data ATS yang sudah tersedia dari *Dashboard* ATS. Setelah data tersebut diperoleh, kami melakukan pembahasan bersama dengan bidang terkait untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Dari hasil pembahasan tersebut kemudian dirumuskan langkah-langkah yang dianggap paling sesuai untuk menangani ATS.”⁶⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa data tidak berhenti pada tahap informasi awal, tetapi menjadi titik masuk utama dalam proses konstruksi kebijakan. Data dari *Dashboard* tidak langsung diinterpretasikan secara final, tetapi terlebih dahulu dipadukan dengan pembacaan kondisi lapangan melalui forum lintas bidang. Dengan demikian, terdapat proses mediasi antara data digital dan realitas sosial sebelum keputusan kebijakan dirumuskan.

Penguatan dari sisi administratif juga terlihat dari penjelasan pengadministrasi yang menyebut bahwa data yang masuk tidak digunakan dalam bentuk mentah, tetapi melalui proses pengelompokan berdasarkan wilayah:

⁶⁴ Haditsa Qur’ani Nurhakim et al., ‘PERUMUSAN, FORMULASI, DAN ADOPSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN’, *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 7, no. 4 (2025): 682–96, <https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i4.2655>.

⁶⁵ Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’, (Dinas Pendidikan Kab. Malang), Mei 2026, Pukul 11.00.

“Data ATS yang masuk dari *Dashboard* kami rekap dan kami kelompokkan berdasarkan wilayah atau kecamatan. Dari data tersebut nantinya pimpinan dan bidang terkait dapat melihat daerah mana yang membutuhkan perhatian lebih.”⁶⁶

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa data tidak hanya berfungsi sebagai representasi angka, tetapi juga mengalami proses kategorisasi ulang dalam struktur birokrasi. Proses pengelompokan wilayah menunjukkan adanya upaya institusional untuk mengubah data nasional menjadi data operasional yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa data menjadi alat navigasi kebijakan dalam menentukan prioritas intervensi.

Jika dilihat secara lebih mendalam, keseluruhan proses perencanaan ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan ATS di Kabupaten Malang bergerak dalam kerangka data-driven governance, di mana realitas sosial terlebih dahulu harus dikonstruksi menjadi data sebelum dapat diintervensi melalui kebijakan.⁶⁷ Dalam kerangka ini, ATS tidak langsung dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks, tetapi terlebih dahulu disederhanakan dalam bentuk kategori administratif seperti putus sekolah, belum pernah sekolah, dan lulus tidak melanjutkan.

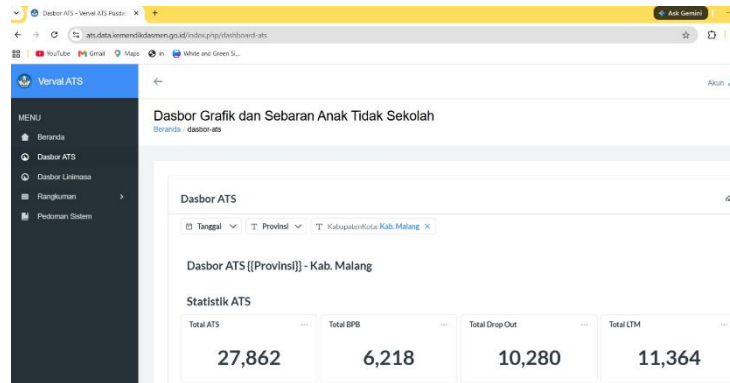
Kondisi tersebut diperkuat oleh keberadaan sistem *Dashboard* ATS Kemendikdasmen yang menjadi instrumen utama dalam pemetaan dan klasifikasi data ATS. Sistem ini tidak hanya menampilkan jumlah ATS, tetapi juga mengorganisasi data berdasarkan usia, wilayah, dan status pendidikan.

Dengan demikian, perencanaan strategi sangat bergantung pada bagaimana

⁶⁶ Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’, (Dinas Pendidikan Kab. Malang), Mei 2026, Pukul 14.00.

⁶⁷ Kusumajanti Kusumajanti et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif :: Teori Dan Paradigma Baru Bidang Ilmu Sosial* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

sistem digital mengonstruksi realitas pendidikan dalam bentuk yang terukur dan dapat dianalisis secara administratif.



Gambar 4.2 *Dashboard* ATS Kemendikdasmen

<https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/index.php/dashboard-ats>

Pada titik ini, terlihat bahwa perhatian kebijakan tidak semata-mata lahir dari kedekatan terhadap realitas sosial, tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlihatan masalah dalam sistem data. Semakin tinggi visibilitas suatu masalah dalam *Dashboard*, semakin besar kemungkinan masalah tersebut menjadi prioritas kebijakan. Sebaliknya, persoalan yang tidak terdata berpotensi tidak memperoleh perhatian institusional meskipun secara sosial memiliki dampak yang signifikan.

Dengan demikian, perencanaan strategi penanganan ATS di Kabupaten Malang tidak hanya mencerminkan proses teknis birokrasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana data membentuk cara institusi memahami, mengklasifikasi, dan merespons realitas pendidikan. Kebijakan yang terbentuk pada akhirnya merupakan hasil interaksi antara data digital, interpretasi birokrasi, dan pembacaan lapangan yang saling melengkapi dalam proses perumusan strategi.

b. Mekanisme pendataan sebagai instrumen pembentuk realitas kebijakan

Pendataan ATS melalui *Dashboard* Kemendikdasmen menjadi fondasi utama dalam perencanaan strategi di Kabupaten Malang. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen yang membentuk cara institusi memahami dan mengelola masalah pendidikan.

Ibu Muthoharoh menjelaskan bahwa seluruh proses pendataan dilakukan melalui sistem digital: “Mekanisme pendataannya melalui *Dashboard* ATS dari Kemendikdasmen. Jadi kami tidak mendata secara manual.”⁶⁸ Pengadministrasi menambahkan bahwa data yang masuk ke sistem tidak langsung digunakan, tetapi harus melalui proses verifikasi dari berbagai pihak:

“Data yang muncul dalam sistem kemudian dipantau dan diperiksa kembali berdasarkan hasil verifikasi dari sekolah, desa, maupun kecamatan.”⁶⁹

Ketua seksi PAUD memperkuat bahwa data tersebut kemudian menjadi dasar dalam pembahasan lintas bidang: “Kami melihat data ATS yang sudah tersedia dari *Dashboard*, kemudian dibahas bersama dengan bidang terkait.”⁷⁰

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh dokumen inovasi SABER ATS yang menunjukkan bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Malang mencapai 19.443 anak. Dari jumlah tersebut, 24,04% merupakan kategori Drop Out (DO), 38,94% Lulus Tidak Melanjutkan

⁶⁸ Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 09.00.

⁶⁹ Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 14.00.

⁷⁰ Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 11.00.

(LTM), dan 37,04% Belum Pernah Bersekolah (BPB).⁷¹ Tingginya angka ATS tersebut menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk menyusun strategi penanganan ATS secara lebih sistematis.

Keterhubungan ini menunjukkan bahwa data tidak hanya menjadi informasi teknis, tetapi juga menjadi mekanisme seleksi awal terhadap realitas sosial yang dianggap penting untuk ditangani. Sistem menciptakan proses penyederhanaan realitas sosial ke dalam kategori administratif yang telah ditentukan. Anak tidak sekolah tidak lagi dipahami secara utuh sebagai individu dengan kompleksitas sosial, tetapi sebagai entitas dalam sistem yang harus diverifikasi, diklasifikasikan, dan ditindaklanjuti.

Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendataan tidak bersifat netral, tetapi turut membentuk cara pandang kebijakan terhadap realitas sosial. Data menjadi filter utama yang menentukan apakah suatu kasus dianggap prioritas atau tidak. Dengan demikian, mekanisme pendataan tidak hanya merekam realitas, tetapi juga membentuk struktur perhatian kebijakan itu sendiri.

c. Keterlibatan lintas bidang sebagai mekanisme integrasi dan kompleksitas koordinasi kebijakan

Perencanaan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Malang memperlihatkan bahwa proses kebijakan tidak berjalan secara linier, tetapi melalui mekanisme koordinasi lintas bidang yang melibatkan berbagai unit dalam struktur Dinas Pendidikan. Setiap bidang tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor interpretatif yang membaca data sesuai dengan perspektif dan kewenangan

⁷¹ Dispendik Kab. Malang, 'Inovasi SABER ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah)', Dokumen KOVABLIK Kabupaten Malang, 2025.

masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan dibangun melalui proses kolektif, bukan keputusan tunggal dari satu unit organisasi.

Tahap awal, data ATS dari *Dashboard* menjadi titik masuk utama dalam proses perencanaan. Data tersebut kemudian tidak langsung dijadikan dasar keputusan, tetapi terlebih dahulu dibahas dalam forum lintas bidang untuk dikaitkan dengan kondisi faktual di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara data administratif dan realitas sosial yang tidak selalu dapat ditangkap secara utuh oleh sistem digital.

Hal ini ditegaskan oleh Ibu Ruhillah yang menjelaskan bahwa proses perencanaan selalu diawali dari pembacaan data sebelum masuk ke tahap diskusi lintas bidang:

“Setelah melihat data ATS dari *Dashboard*, kami melakukan pembahasan bersama dengan bidang terkait untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Dari situ baru kami bisa merumuskan langkah-langkah yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan penanganan.”⁷²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa data tidak berdiri sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan, tetapi menjadi pemicu awal untuk masuk ke tahap interpretasi kebijakan. Artinya, data berfungsi sebagai pintu masuk, sementara keputusan kebijakan lahir dari proses dialog antarbidang yang mencoba menafsirkan makna di balik angka-angka tersebut.

Pada tahap berikutnya, intensitas masalah yang ditunjukkan oleh data juga berpengaruh terhadap urgensi respons kelembagaan. Ketika jumlah ATS menunjukkan angka yang tinggi, maka hal tersebut menjadi dasar

⁷² Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 11.00.

dilaksanakannya rapat koordinasi untuk merumuskan strategi penanganan yang lebih terstruktur. Hal ini disampaikan oleh ibu Muthoharoh:

“Setelah pendataannya selesai dan ternyata jumlah ATS cukup tinggi, akhirnya kami mengadakan rapat bersama. Semua bidang dilibatkan untuk merumuskan strategi dan program yang bisa digunakan untuk menangani ATS ini.”⁷³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa eskalasi data memiliki fungsi politik dalam birokrasi pendidikan, dalam arti data tidak hanya mencerminkan kondisi, tetapi juga menentukan tingkat prioritas kebijakan. Semakin tinggi angka ATS, semakin besar tekanan institusional untuk merespons melalui pembentukan kebijakan baru. Dengan demikian, data tidak hanya menjadi alat monitoring, tetapi juga menjadi mekanisme yang menggerakkan respons organisasi.

Pada level administratif, data tersebut kemudian tidak hanya dibahas, tetapi juga diolah menjadi bentuk yang lebih operasional agar dapat digunakan oleh pimpinan dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini menunjukkan adanya transformasi data dari bentuk mentah menjadi informasi kebijakan yang lebih terstruktur.

Ibu Nila Mayasari menambahkan:

“Data ATS yang masuk dari *Dashboard* kami rekap dan kami kelompokkan berdasarkan wilayah atau kecamatan. Hasil pengelompokan itu kemudian kami sampaikan kepada pimpinan untuk membantu menentukan wilayah mana yang perlu menjadi prioritas penanganan.”⁷⁴

⁷³ Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 09.00.

⁷⁴ Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 14.00.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses administratif memiliki peran penting dalam menjembatani antara data digital dan keputusan kebijakan. Pengelompokan berdasarkan wilayah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membentuk cara pandang institusi terhadap distribusi masalah ATS. Wilayah dengan jumlah ATS tinggi secara otomatis memperoleh perhatian lebih dalam proses perencanaan.

Jika dilihat secara keseluruhan, perencanaan strategi ATS di Kabupaten Malang memperlihatkan adanya struktur kebijakan yang bersifat kolektif dan berlapis. Proses ini melibatkan transformasi data dari sistem digital, kemudian melalui interpretasi lintas bidang, hingga akhirnya diformalkan dalam keputusan kelembagaan. Namun di balik struktur tersebut, terdapat konsekuensi berupa kompleksitas birokrasi yang cukup tinggi.

Kompleksitas ini tercermin dari panjangnya rantai koordinasi yang harus dilalui sebelum kebijakan dapat ditetapkan. Di satu sisi, kondisi ini memberikan keuntungan berupa meningkatnya validitas kebijakan karena melibatkan berbagai perspektif. Setiap bidang memberikan sudut pandang yang berbeda sehingga keputusan yang dihasilkan lebih komprehensif.

Namun di sisi lain, struktur koordinasi yang berlapis juga berpotensi memperlambat respons kebijakan terhadap persoalan yang bersifat dinamis seperti ATS. Ketika proses perumusan kebijakan harus melalui beberapa tahap diskusi dan verifikasi, maka terdapat risiko keterlambatan dalam merespons kasus yang membutuhkan penanganan cepat. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan akurasi kebijakan dan tuntutan kecepatan respons dalam praktik tata kelola pendidikan.

Dengan demikian, perencanaan strategi penanganan ATS di Kabupaten Malang tidak hanya dapat dipahami sebagai proses administratif semata, tetapi juga sebagai arena negosiasi antara data, aktor birokrasi, dan realitas sosial yang terus bergerak.

- d. Arah jangka panjang sebagai upaya penanganan struktural dan penguatan sistem pendidikan

Perencanaan jangka panjang penanganan ATS di Kabupaten Malang tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang sudah terjadi, tetapi juga pada upaya mengurangi faktor penyebab utama munculnya ATS. Fokus utama diarahkan pada penguatan bantuan pendidikan, perluasan akses, serta peningkatan sistem pendataan. Ibu Muthoharoh menjelaskan bahwa:

“Kami terus mengusulkan tambahan bantuan dan kuota BIP atau Program Indonesia Pintar supaya lebih banyak anak yang bisa terbantu.”⁷⁵

Kasi PAUD menambahkan bahwa sistem pendataan dan dukungan pendidikan ke depan diharapkan semakin terintegrasi dan luas: “Ke depan kami berharap sistem pendataan ATS semakin baik dan dukungan bantuan pendidikan semakin luas.”⁷⁶

Pengadministrasi memperkuat bahwa *Dashboard* digunakan untuk melihat tren penurunan ATS dari waktu ke waktu: “Dari *Dashboard* bisa dilihat apakah jumlah ATS mengalami penurunan atau tidak.”⁷⁷ Hal ini diperkuat oleh Dokumen SABER ATS menunjukkan bahwa faktor ekonomi

⁷⁵ Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 09.00.

⁷⁶ Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 11.00.

⁷⁷ Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 14.00.

menjadi penyebab terbesar ATS dengan persentase 67%, diikuti keterbatasan infrastruktur pendidikan sebesar 18%, dan pernikahan dini sebesar 15%.⁷⁸

Arah kebijakan jangka panjang ini menunjukkan bahwa strategi tidak hanya berorientasi pada penanganan individual, tetapi juga pada perbaikan sistem pendidikan secara bertahap. Namun fokus yang dominan masih berada pada aspek akses dan bantuan pendidikan, sementara akar struktural seperti ketimpangan sosial dan kondisi ekonomi keluarga masih menjadi tantangan yang lebih luas dan tidak sepenuhnya tersentuh dalam kebijakan. Dengan demikian, strategi jangka panjang masih berada pada tahap penguatan sistem pendidikan, belum sepenuhnya mencapai transformasi sosial yang lebih mendalam dalam konteks penanganan ATS.

2. Implementasi Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) Tingkat SMP

Implementasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diterjemahkan ke dalam bentuk program operasional yang bekerja secara sistematis di lapangan. Dinas Pendidikan tidak hanya berperan sebagai perumus kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang menggerakkan mekanisme penanganan melalui sistem kerja yang terintegrasi. Dalam konteks ini, Saber ATS menjadi instrumen utama yang menghubungkan proses pendataan, verifikasi, hingga penjangkauan langsung terhadap anak yang tidak lagi mengakses pendidikan formal. Implementasi program ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan

⁷⁸ Dispendik Kab. Malang, 'Inovasi SABER ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah)'.

jaringan kerja lintas sektor yang mencakup sekolah, pemerintah desa, kecamatan, serta unsur masyarakat, sehingga penanganan ATS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial dan partisipatif. Dengan demikian, implementasi strategi ini dapat dilihat sebagai upaya konkret dalam menerjemahkan kebijakan pendidikan ke dalam tindakan nyata yang berorientasi pada pemulihan akses pendidikan anak.

a. Implementasi Saber ATS sebagai sistem utama penanganan Anak Tidak Sekolah

Implementasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa Saber ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah) menjadi instrumen utama yang mengubah pola kerja Dinas Pendidikan dari sekadar pendataan administratif menuju sistem penanganan berbasis data dan intervensi lapangan. Program ini tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan teknis, tetapi sebagai kerangka kerja yang menghubungkan proses identifikasi, verifikasi, hingga penanganan langsung terhadap anak yang tidak lagi mengakses pendidikan formal.

Ibu Muthoharoh menjelaskan bahwa perubahan pendekatan ini muncul setelah data ATS menunjukkan angka yang cukup tinggi:

“Sebelum ada program Saber ATS ini, kami belum terlalu fokus pada penanganan ATS secara khusus. Setelah datanya terkumpul dan ternyata cukup tinggi, akhirnya kami mengadakan rapat bersama untuk merumuskan strategi.”⁷⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Saber ATS lahir dari kebutuhan empiris yang berbasis pada temuan data, bukan sekadar instruksi kebijakan.

⁷⁹ Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 09.00.

Hal ini diperkuat oleh Ibu Dewi Ruhillah yang menegaskan bahwa seluruh proses implementasi selalu dimulai dari data *Dashboard* ATS:

“Proses perencanaan biasanya diawali dengan melihat data ATS dari *Dashboard*. Setelah itu kami membahas bersama untuk menentukan langkah yang sesuai di lapangan.”⁸⁰

Sementara itu, pengadministrasi menambahkan bahwa keberjalanan program tidak dapat dilepaskan dari dukungan administrasi yang memastikan seluruh proses terdokumentasi dengan baik: “Kami membantu menyiapkan data, surat, laporan, serta berbagai kebutuhan administrasi selama pelaksanaan program berlangsung.”⁸¹

Keterhubungan tiga pernyataan ini menunjukkan bahwa Saber ATS bekerja melalui tiga lapisan utama yang saling menopang, yaitu sistem data digital, koordinasi kelembagaan, dan dukungan administratif. Integrasi ini menjadikan Saber ATS tidak hanya sebagai program intervensi, tetapi sebagai sistem kerja yang terstruktur dari hulu ke hilir.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS BAPU BERSIH ANAK TIDAK BERKOLAH		
NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM KEDIRYAJAN
1	2	3
1.	Kelompok Kerja Unit Perencanaan a. Koordinator b. Anggota:	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 1. Sekretaris Dinas Pendidikan; 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
2.	Kelompok Kerja Unit Pendataan a. Koordinator b. Anggota:	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; 3. Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial; 5. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama; 6. Kepala Seksi Pendidikan Disiplin dan Pendidikan Penertiban pada Kantor Kementerian Agama.
3.	Kelompok Kerja Unit Penanganan a. Koordinator b. Anggota:	Sekretaris Dinas Pendidikan. 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial; 2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Gambar 4.3 Susunan Keanggotaan SABER ATS

⁸⁰ Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 11.00.

⁸¹ Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 14.00.

Dalam praktiknya, *Dashboard* ATS menjadi pintu masuk utama dalam menentukan prioritas wilayah dan kasus. Data yang muncul kemudian tidak langsung diperlakukan sebagai kebenaran final, tetapi diverifikasi ulang melalui sekolah dan pemerintah desa.

Berdasarkan dokumen inovasi SABER ATS, pelaksanaan program dilakukan melalui pembentukan Tim SABER ATS mulai tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Tim tersebut bertugas melakukan pelacakan, validasi, dan pendampingan terhadap ATS agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan. Seluruh proses didukung melalui SIM SABER ATS yang digunakan untuk pendataan, validasi, dan pemantauan secara real-time.

Sistem ini menunjukkan bahwa Saber ATS tidak hanya bekerja pada level implementasi kebijakan, tetapi juga membangun mekanisme kontrol terhadap kualitas data itu sendiri. Validasi berlapis ini menjadi penting karena data ATS bersifat dinamis, dipengaruhi oleh mobilitas penduduk dan perubahan status sosial anak.

Pada tahap ini, Saber ATS tidak hanya berfungsi sebagai alat pendataan, tetapi juga sebagai instrumen pemetaan sosial pendidikan. Setiap data yang masuk tidak hanya merepresentasikan angka, tetapi juga kondisi sosial tertentu yang harus ditindaklanjuti secara berbeda. Hal ini menjadikan implementasi program lebih kompleks dibanding sekadar pengumpulan data statistik.

Selain itu, pendekatan berbasis data ini memperlihatkan adanya pergeseran cara kerja birokrasi pendidikan yang sebelumnya cenderung administratif menjadi lebih responsif terhadap kondisi lapangan. Saber ATS

menjadi pintu masuk bagi perubahan tersebut, meskipun dalam praktiknya masih sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar lembaga.

b. Kolaborasi lintas sektor sebagai mekanisme operasional Saber ATS

Implementasi Saber ATS memperlihatkan bahwa penanganan ATS tidak dapat dijalankan secara tunggal oleh Dinas Pendidikan, melainkan membutuhkan jaringan kolaborasi yang melibatkan sekolah, pemerintah desa, kecamatan, hingga masyarakat. Kolaborasi ini menjadi tulang punggung dalam proses verifikasi dan penjangkauan anak yang tidak bersekolah.

Ibu Muthoharoh menegaskan bahwa:

“Kami bekerja sama dengan pihak sekolah, kecamatan, desa, PKBM, tokoh masyarakat, bahkan RT dan RW. Mereka membantu dalam proses verifikasi data dan pendekatan kepada keluarga ATS.”⁸²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa implementasi Saber ATS bergerak dalam pola kerja multi-aktor yang tidak hanya formal, tetapi juga sosial. Hal ini diperkuat oleh Kasi PAUD yang menekankan bahwa setiap pihak memiliki fungsi berbeda sesuai posisi dan kewenangannya:

“Kerja sama dilakukan dengan banyak pihak karena masing-masing memiliki peran sesuai kewenangannya, mulai dari sekolah sampai tokoh masyarakat.”⁸³

Pengadministrasi menambahkan bahwa masyarakat sering menjadi sumber informasi awal yang sangat penting dalam proses identifikasi ATS:

⁸² Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 09.00.

⁸³ Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 11.00.

“Masyarakat dan tokoh lingkungan sering membantu memberikan informasi terkait kondisi anak yang tidak bersekolah.”⁸⁴

Keterhubungan ini menunjukkan bahwa Saber ATS tidak hanya bekerja dalam struktur birokrasi formal, tetapi juga memanfaatkan jaringan sosial sebagai sumber data dan jalur intervensi. Sekolah berperan sebagai deteksi awal, pemerintah desa sebagai penghubung sosial, dan tokoh masyarakat sebagai akses langsung ke keluarga.



Gambar 4.4 Kordinasi Penanganan ATS tingkat Kecamatan Bersama DPRD Kab. Malang

Dalam banyak kasus, validasi data tidak dapat diselesaikan hanya melalui sistem digital karena terdapat ketidaksesuaian antara data *Dashboard* dengan kondisi nyata di lapangan. Anak yang berpindah domisili, bekerja, atau tidak terjangkau oleh sistem administrasi menjadi tantangan utama dalam proses verifikasi. Oleh karena itu, pendekatan sosial menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi Saber ATS.

⁸⁴ Nila Mayasari, 'Wawancara Pengadministrasi Perkantoran'. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 14.00.

Kolaborasi ini juga memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial masyarakat. Semakin kuat relasi antaraktor lokal, semakin tinggi peluang keberhasilan dalam menemukan dan menjangkau ATS yang sebelumnya tidak terdata. Selain itu, pola kolaborasi ini menciptakan distribusi tanggung jawab yang lebih luas, sehingga penanganan ATS tidak sepenuhnya menjadi beban Dinas Pendidikan. Namun demikian, efektivitas kolaborasi ini sangat bergantung pada tingkat kepedulian masing-masing aktor di lapangan, yang dalam beberapa kasus masih belum merata.

c. Penjangkauan dan reintegrasi anak tidak sekolah melalui mekanisme Saber ATS

Implementasi Saber ATS tidak berhenti pada proses pendataan dan verifikasi, tetapi juga mencakup upaya penjangkauan dan pengembalian anak ke dalam sistem pendidikan. Pendekatan yang digunakan bersifat adaptif, disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta usia anak yang menjadi sasaran program.

Ibu Muthoharoh menjelaskan bahwa:

“Kalau penyebabnya faktor ekonomi dan masih usia sekolah, kami upayakan kembali ke sekolah dengan bantuan beasiswa. Kalau sudah tidak usia sekolah, kami arahkan ke program kesetaraan.”⁸⁵

Hal ini diperkuat oleh Kasi PAUD yang menegaskan bahwa jalur pendidikan disesuaikan dengan kondisi individu:

⁸⁵ Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 09.00.

“Anak yang masih memungkinkan kembali ke sekolah formal akan didorong, sedangkan yang tidak memungkinkan diarahkan ke pendidikan kesetaraan melalui PKBM.”⁸⁶

Pengadministrasi menambahkan bahwa proses tersebut didukung oleh pengelolaan administrasi yang memastikan anak dapat kembali tercatat dalam sistem pendidikan: “Kami menyiapkan dokumen dan laporan untuk mendukung proses penyaluran kembali anak ke layanan pendidikan.”⁸⁷

Berdasarkan paparan diatas Saber ATS tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi, tetapi juga sebagai mekanisme reintegrasi pendidikan. Program ini bekerja dengan dua jalur utama, yaitu pengembalian ke pendidikan formal melalui dukungan bantuan, dan pengalihan ke pendidikan nonformal melalui PKBM.

Proses reintegrasi ini dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga. Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu cenderung lebih responsif terhadap bantuan pendidikan, sedangkan anak yang sudah bekerja atau memiliki pengalaman putus sekolah yang lama lebih sulit untuk kembali ke sistem formal.

Selain itu, faktor motivasi individu juga menjadi variabel penting dalam keberhasilan reintegrasi. Tidak sedikit kasus di mana anak menolak kembali ke sekolah karena sudah merasa nyaman dengan aktivitas kerja atau lingkungan sosial di luar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan

⁸⁶ Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 11.00.

⁸⁷ Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 14.00.

ATS tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga aspek psikologis yang lebih dalam.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa Saber ATS berfungsi sebagai jembatan transisi antara anak yang terputus dari pendidikan dan sistem pendidikan formal maupun nonformal. Namun jembatan ini tidak selalu bekerja secara otomatis, melainkan membutuhkan dorongan kebijakan lanjutan berupa bantuan pendidikan, pendampingan sosial, serta keterlibatan keluarga.

Pada titik ini, implementasi Saber ATS menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menemukan ATS, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keberlanjutan proses pendidikan setelah anak kembali teridentifikasi. Tanpa dukungan lanjutan, proses reintegrasi berpotensi hanya bersifat sementara.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) Tingkat SMP

Implementasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Saber ATS memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh bagaimana program tersebut berinteraksi dengan struktur sosial masyarakat, kapasitas kelembagaan, serta kualitas sistem data yang digunakan. Penanganan ATS pada tingkat SMP memiliki kompleksitas tersendiri karena berada pada fase usia transisi yang sangat dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, faktor pendukung dan penghambat menjadi

elemen penting dalam membaca keberhasilan implementasi kebijakan ini di tingkat daerah.

a. Faktor Pendukung Implementasi Saber ATS

Faktor pendukung utama dalam implementasi Saber ATS terletak pada kuatnya sinergi antar aktor pendidikan yang terlibat dalam proses penanganan ATS. Sinergi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan dimensi sosial yang memungkinkan proses penjangkauan berjalan lebih efektif di tingkat akar rumput. Keterlibatan berbagai pihak seperti sekolah, pemerintah desa, kecamatan, dan tokoh masyarakat menciptakan jejaring kerja yang memperluas jangkauan intervensi kebijakan.

Hal ini ditegaskan oleh Ibu Muthoharoh yang menyatakan:

“Sinergi semua pihak itu penting, mulai dari pemerintah pusat, daerah, kecamatan, desa, sekolah, orang tua, sampai anaknya sendiri. Tokoh masyarakat juga sangat penting karena biasanya lebih didengar oleh masyarakat dibandingkan kami dari dinas.”⁸⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada struktur formal pemerintahan, tetapi juga pada legitimasi sosial yang dimiliki oleh aktor lokal. Tokoh masyarakat berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan keluarga ATS, sehingga proses pendekatan menjadi lebih diterima. Dalam konteks kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi sangat ditentukan oleh kapasitas aktor non-formal dalam memperkuat penerimaan kebijakan di masyarakat.

⁸⁸ Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 09.00.

Selain aspek sosial, faktor pendukung lain yang sangat penting adalah kualitas data yang digunakan dalam proses penanganan ATS. Data menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas intervensi, wilayah sasaran, serta bentuk penanganan yang diberikan kepada anak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Nila Mayasari: “Yang paling mendukung itu data yang akurat dan kerja sama antarinstansi.”⁸⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem data tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan. Akurasi data memungkinkan dinas untuk memetakan kasus ATS secara lebih tepat, sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih terarah. Dalam konteks tata kelola pendidikan, kualitas data menjadi indikator penting dalam menentukan efektivitas kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).⁹⁰

Ibu Dewi Ruhillah juga menambahkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh unsur pendidikan dan masyarakat. “Faktor yang paling mendukung adalah sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga.”⁹¹

Pernyataan ini memperkuat bahwa penanganan ATS tidak dapat dipisahkan dari peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama.

Tanpa dukungan keluarga, upaya intervensi dari pemerintah dan sekolah akan

⁸⁹ Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 14.00.

⁹⁰ Nur Hidayat, ‘Penerapan Evidence Based Policy Dalam Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar The Implementation of Evidence-Based Policy in Population Administration Service Innovation at the Department of Population and Civil Registration of Makassar City’ (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2016),

⁹¹ Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 11.00.

sulit mencapai hasil optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada keselarasan antara kebijakan formal dan dukungan sosial di tingkat mikro.



Gambar 4.5 Sosialisasi Penanganan ATS oleh Dinas

Berdasarkan dokumen inovasi SABER ATS, jumlah ATS di Kabupaten Malang berhasil diturunkan dari 19.443 anak menjadi 17.118 anak atau mengalami penurunan sebesar 11,96%. Penurunan juga terjadi pada kategori Drop Out (DO) sebesar 23,26%, Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) sebesar 11,62%, dan Belum Pernah Bersekolah (BPB) sebesar 7,89%.⁹²

Analisis dari keseluruhan data menunjukkan bahwa faktor pendukung utama implementasi Saber ATS berada pada dua dimensi, yaitu dimensi kelembagaan dan dimensi sosial. Dimensi kelembagaan tercermin dari sistem data dan koordinasi antarinstansi, sedangkan dimensi sosial tercermin dari peran tokoh masyarakat dan keluarga. Kedua dimensi ini saling memperkuat dalam menciptakan ekosistem penanganan ATS yang lebih responsif dan adaptif terhadap kondisi lapangan.

⁹² Dispendik Kab. Malang, 'Inovasi SABER ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah)'.

b. Faktor Penghambat Implementasi Saber ATS

Implementasi Saber ATS juga menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat multidimensional, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun administratif. Hambatan ini menunjukkan bahwa penanganan ATS tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pendidikan, tetapi juga terkait dengan kondisi struktural masyarakat yang lebih luas.

Hambatan pertama terlihat dari rendahnya motivasi anak untuk kembali melanjutkan pendidikan. Dalam banyak kasus, anak yang sudah putus sekolah cenderung memilih bekerja atau terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga, sehingga pendidikan tidak lagi menjadi prioritas utama. Hal ini disampaikan oleh Kasi PAUD:

“Kendala biasanya berasal dari faktor ekonomi dan rendahnya motivasi anak untuk kembali bersekolah. Ada juga yang sudah bekerja.”⁹³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai penyebab awal putus sekolah, tetapi juga memperkuat keputusan anak untuk tidak kembali ke pendidikan formal. Dalam konteks ini, pendidikan berada dalam posisi subordinat terhadap kebutuhan ekonomi jangka pendek keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya tantangan struktural dalam upaya mengembalikan anak ke sistem pendidikan.

Hambatan berikutnya berasal dari lingkungan keluarga yang kurang memberikan dukungan terhadap pendidikan anak. Dukungan keluarga menjadi faktor determinan dalam keberhasilan program karena keputusan untuk kembali bersekolah sangat dipengaruhi oleh orang tua. Kasi SMP

⁹³ Dewi Ruhillah, ‘Wawancara Kepala Seksi PAUD’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 11.00.

menjelaskan kondisi tersebut: “Ada anak yang memang sudah tidak mau sekolah lagi, dan ada orang tua yang kurang mendukung pendidikan anak.”⁹⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga dapat menjadi faktor penghambat apabila tidak memiliki kesadaran pendidikan yang memadai. Dalam konteks kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa intervensi pendidikan tidak dapat hanya menasar anak, tetapi juga harus menyentuh pola pikir keluarga.

Selain faktor sosial, hambatan juga muncul dari aspek administratif, khususnya terkait validitas data ATS. Mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan sebagian data tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Hal ini dijelaskan oleh pengadministrasi: “Kadang ada anak yang sudah pindah domisili tetapi masih tercatat dalam sistem.”⁹⁵

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara data administratif dan realitas sosial di lapangan. Ketidaksesuaian data dapat menghambat proses verifikasi dan menyebabkan penanganan menjadi kurang tepat sasaran. Dalam konteks implementasi kebijakan berbasis data, masalah ini menunjukkan perlunya sistem pendataan yang lebih dinamis dan terintegrasi dengan kondisi real time di masyarakat. Lebih lanjut Dinas Pendidikan Kab. Malang juga selalu melakukan evaluasi secara bertahap terhadap kinerja yg telah dilakukan.

⁹⁴ Muthoharoh, ‘Wawancara Kepala Seksi Kesiswaan SMP’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 09.00.

⁹⁵ Nila Mayasari, ‘Wawancara Pengadministrasi Perkantoran’. (Dinas Pendidikan Kab. Malang), 12 Mei 2026 pukul 11.00.



Gambar 4.6 Rapat Evaluasi Triwulan Dinas Pendidikan Kab. Malang

Analisis dari seluruh temuan menunjukkan bahwa hambatan implementasi Saber ATS tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait antara faktor ekonomi, sosial, dan teknis. Faktor ekonomi mempengaruhi motivasi anak, faktor sosial menentukan dukungan keluarga, sedangkan faktor teknis mempengaruhi akurasi intervensi kebijakan. Kombinasi ketiga faktor ini menjadikan penanganan ATS sebagai isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan lintas sektor yang lebih kuat.

C. Hasil Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dengan informan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang serta didukung oleh dokumentasi, peneliti mengidentifikasi bahwa strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) menunjukkan adanya pola kerja terstruktur, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Temuan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
1	Perencanaan strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam menangani ATS tingkat SMP	- Pemetaan data ATS melalui <i>Dashboard</i> Kemendikdasmen - Verifikasi data oleh sekolah, kecamatan, dan desa - Rapat koordinasi lintas bidang Dinas Pendidikan - Perumusan strategi berbasis program Saber ATS - Mengacu pada Permendikbud dan juknis pemerintah pusat
2	Implementasi strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam menangani ATS tingkat SMP	- Pelaksanaan program Saber ATS (pendataan, verifikasi, penjangkauan, pengembalian) - Keterlibatan sekolah, desa, kecamatan, PKBM, dan tokoh masyarakat- Penarikan kembali ATS ke sekolah formal - Pengarahan ke pendidikan kesetaraan bagi kasus tertentu - Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat
3	Faktor pendukung dan penghambat strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam menangani ATS tingkat SMP	Pendukung: - Sinergi antar instansi pendidikan dan pemerintah daerah - Peran tokoh masyarakat dalam penjangkauan ATS - Sistem data <i>Dashboard</i> ATS yang terintegrasi Penghambat:

		- Rendahnya motivasi anak untuk kembali sekolah - Kurangnya dukungan orang tua - Faktor ekonomi keluarga - Ketidaksesuaian data dan mobilitas penduduk
--	--	--

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Menangani ATS Tingkat SMP

Perencanaan strategi menjadi tahapan awal yang menentukan arah kebijakan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Malang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyusunan strategi diawali dengan proses identifikasi masalah melalui pemetaan data ATS yang diperoleh dari sistem pendataan. Data tersebut menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan untuk mengetahui tingkat sebaran, jumlah, dan karakteristik ATS sehingga masalah yang sebelumnya bersifat umum dapat dipetakan secara lebih spesifik. Kejelasan data inilah yang kemudian mendorong lahirnya berbagai langkah perencanaan dalam penanganan ATS.

Perspektif Fred R. David menjelaskan bahwa perumusan strategi (*strategy formulation*) merupakan proses penentuan tujuan organisasi yang diawali dengan identifikasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi.⁹⁶ Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah menjalankan tahapan tersebut melalui proses pengumpulan dan analisis data sebelum menentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan. Keputusan untuk menjadikan ATS sebagai program prioritas tidak muncul secara spontan, melainkan lahir dari pembacaan terhadap kondisi nyata yang ditemukan melalui proses pendataan. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang disusun memiliki dasar empiris yang jelas sehingga arah kebijakan yang dihasilkan lebih terukur.

⁹⁶ David, *Strategic Management Concepts and Cases* (Prentice hall, 2011).

Data ATS tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga menjadi instrumen yang membentuk cara pandang pemerintah terhadap persoalan pendidikan. Sebelum data dihimpun secara sistematis, ATS cenderung dipahami sebagai kasus-kasus yang berdiri sendiri dan tersebar di berbagai wilayah. Setelah data terkonsolidasi, persoalan tersebut mulai terlihat sebagai masalah struktural yang memerlukan penanganan secara khusus. Perubahan cara pandang ini penting karena menentukan bagaimana pemerintah menetapkan prioritas kebijakan. Masalah yang dapat dipetakan secara jelas cenderung lebih mudah memperoleh perhatian dibandingkan masalah yang tidak memiliki dukungan data yang memadai.

Proses perencanaan yang ditemukan dalam penelitian ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi antarbidang dalam penyusunan kebijakan. Penanganan ATS tidak dirumuskan oleh satu bidang secara mandiri, melainkan melalui pembahasan bersama yang melibatkan beberapa unsur dalam Dinas Pendidikan. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ATS dipahami sebagai masalah yang kompleks sehingga membutuhkan berbagai sudut pandang dalam proses penyelesaiannya. Setiap bidang memiliki peran untuk memberikan informasi dan pertimbangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya berangkat dari satu perspektif.

Karakteristik perencanaan seperti ini sejalan dengan pandangan Fred R. David yang menempatkan koordinasi organisasi sebagai salah satu unsur penting dalam perumusan strategi. Strategi yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketepatan membaca masalah, tetapi juga oleh kemampuan organisasi membangun

kesepahaman mengenai langkah yang akan ditempuh.⁹⁷ Kesepahaman tersebut menjadi penting karena implementasi kebijakan nantinya akan melibatkan berbagai pihak yang harus bekerja dalam tujuan yang sama.

Perencanaan strategi penanganan ATS di Kabupaten Malang memperlihatkan adanya kecenderungan penggunaan pendekatan berbasis data (*evidence-based planning*). Pendekatan ini memungkinkan kebijakan disusun berdasarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Ketepatan sasaran menjadi lebih mudah dicapai karena pemerintah memiliki informasi yang cukup mengenai kelompok yang membutuhkan intervensi. Risiko kesalahan dalam menentukan prioritas program juga dapat diminimalkan karena keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada asumsi atau perkiraan.

Perspektif Islam memandang proses perencanaan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab pemimpin dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan masyarakat. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam.⁹⁸ Kewajiban menuntut ilmu menunjukkan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dirinya melalui pendidikan. Upaya pemerintah memetakan dan mengidentifikasi ATS dapat dipahami sebagai langkah awal untuk memastikan hak tersebut tetap terjaga.

Konsep *al-mas'uliyah* atau tanggung jawab kepemimpinan juga terlihat dalam proses perencanaan yang dilakukan. Perhatian terhadap tingginya angka ATS menunjukkan adanya kesadaran pemerintah daerah untuk mengenali

⁹⁷ Siti Nur A'isyah et al., 'Membaca Kritis: Bagaimana Mengidentifikasi Informasi Yang Akurat', *PIJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 2 (2025): 187–98, <https://doi.org/10.58540/pijar.v3i2.795>.

⁹⁸ Al Mujib et al., 'Analisis Kedudukan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional', *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)* 6, no. 2 (2025): 735–39, <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v6i2.967>.

persoalan yang dihadapi masyarakat sebelum menentukan kebijakan yang akan diambil. Kesadaran tersebut menjadi bagian penting dari amanah kepemimpinan karena kebijakan yang baik hanya dapat lahir dari pemahaman yang memadai terhadap kebutuhan masyarakat.

Makna perencanaan tidak berhenti pada penyusunan program, tetapi juga berkaitan dengan upaya mencegah munculnya persoalan yang lebih besar di masa depan. QS. An-Nisa ayat 9 mengingatkan pentingnya menjaga agar tidak lahir generasi yang lemah.⁹⁹ Fenomena ATS berpotensi melahirkan berbagai dampak sosial seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya kesempatan kerja, dan meningkatnya kerentanan ekonomi. Identifikasi serta pemetaan ATS yang dilakukan sejak awal menunjukkan adanya langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut melalui kebijakan pendidikan yang lebih terarah.

Prinsip keadilan yang terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 90 juga tercermin dalam proses perencanaan ini. Data ATS memberikan gambaran mengenai kelompok masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan sehingga kesempatan memperoleh pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata. Perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat menunjukkan upaya menghadirkan keadilan dalam pelayanan pendidikan.

⁹⁹ *Mencetak Generasi Qur'ani yang Berkarakter dan Berintegritas: Kajian Teks dalam Surat An-Nisa' Ayat 9 di Era Digital | Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, n.d., accessed 13 June 2026, <https://ejournal.undar.or.id/index.php/sumbula/article/view/1047>.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan strategi penanganan ATS di Kabupaten Malang telah mencerminkan tahapan perumusan strategi sebagaimana dijelaskan oleh Fred R. David. Identifikasi masalah, analisis data, koordinasi antarbidang, dan penentuan arah kebijakan menjadi bagian yang saling berkaitan dalam proses tersebut. Nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya pendidikan, tanggung jawab kepemimpinan, perlindungan terhadap generasi, serta keadilan sosial turut memberikan landasan normatif terhadap kebijakan yang dirumuskan. Perencanaan yang matang menjadi faktor penting karena menentukan efektivitas langkah-langkah penanganan ATS pada tahap berikutnya.

B. Implementasi Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Menangani ATS Tingkat SMP

Implementasi merupakan tahap yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah strategi. Fred R. David menjelaskan bahwa strategi yang telah dirumuskan hanya akan menjadi dokumen administratif apabila tidak diterjemahkan ke dalam tindakan operasional yang nyata.¹⁰⁰ Oleh karena itu, implementasi memiliki posisi sentral karena menjadi jembatan antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang ingin dicapai. Berdasarkan temuan penelitian, implementasi strategi penanganan ATS di Kabupaten Malang diwujudkan melalui pemanfaatan aplikasi Saber ATS, pelaksanaan penjangkauan langsung kepada anak tidak sekolah, serta pemberian fasilitasi pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing anak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi yang dijalankan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memiliki karakteristik berbasis data (*data-driven policy*). Hal ini terlihat dari posisi Saber ATS yang menjadi

¹⁰⁰ David, *Strategic Management Concepts and Cases* (Prentice hall, 2011).

instrumen utama dalam seluruh proses penanganan. Data tidak hanya digunakan sebagai alat pendataan, tetapi menjadi dasar dalam menentukan sasaran, menyusun prioritas, serta mengarahkan tindakan lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma birokrasi pendidikan dari pola kerja yang bersifat administratif menuju pola kerja yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi bertumpu pada asumsi atau perkiraan, melainkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam sistem.

Perspektif Fred R. David menegaskan bahwa implementasi strategi yang efektif mensyaratkan adanya keselarasan antara tujuan organisasi, sumber daya, dan mekanisme pelaksanaan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Pendidikan telah berupaya membangun keselarasan tersebut melalui integrasi antara teknologi informasi, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor. Keberadaan Saber ATS menyediakan data yang diperlukan, sementara proses penjangkauan lapangan menjadi sarana untuk memverifikasi sekaligus menindaklanjuti informasi yang tersedia. Hubungan antara kedua komponen ini menunjukkan bahwa implementasi strategi tidak berjalan secara parsial, melainkan saling terhubung dalam satu sistem kerja yang berkelanjutan.

Aspek menarik dari implementasi strategi ini adalah munculnya pendekatan yang lebih proaktif dalam pelayanan pendidikan. Sebelum adanya sistem penanganan yang terintegrasi, anak yang putus sekolah umumnya baru diketahui setelah berada cukup lama di luar satuan pendidikan. Situasi tersebut menyebabkan pemerintah sering berada pada posisi menunggu laporan dari sekolah atau

masyarakat.¹⁰¹ Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut mulai berubah karena pemerintah berupaya mendatangi dan menemukan ATS melalui data yang tersedia. Pergeseran ini menunjukkan bahwa implementasi strategi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah yang sudah terjadi, tetapi juga mengarah pada upaya deteksi dan penanganan yang lebih dini.

Meskipun demikian, implementasi strategi tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang menyertainya. Data ATS yang tersedia dalam sistem tidak selalu menggambarkan kondisi riil di lapangan secara utuh. Beberapa anak yang tercatat sebagai ATS terkadang telah berpindah domisili, bekerja, menikah, atau sulit ditemukan keberadaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ATS bukan sekadar persoalan administrasi pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Akibatnya, keberhasilan implementasi strategi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem informasi, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam memahami kompleksitas kondisi lapangan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi strategi penanganan ATS pada dasarnya bergerak dalam dua dimensi sekaligus. Dimensi pertama adalah dimensi administratif yang berfokus pada pendataan, pemantauan, dan pengelolaan informasi. Dimensi kedua adalah dimensi sosial yang berkaitan dengan proses membangun komunikasi, memberikan pendampingan, serta meyakinkan keluarga agar anak kembali memperoleh layanan pendidikan. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan karena data yang akurat tidak akan menghasilkan perubahan apabila tidak diikuti dengan pendekatan sosial yang memadai.

¹⁰¹ Lennanda Sandhopa, 'Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang' (diploma, IAIN BENGKULU, 2019), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3436/>.

Perspektif Islam memberikan kerangka yang lebih luas dalam memahami implementasi strategi tersebut. Pendidikan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif yang harus dijamin keberlangsungannya.¹⁰² Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu menunjukkan bahwa akses pendidikan merupakan hak yang harus diperoleh setiap anak. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menemukan dan mengembalikan ATS ke dalam sistem pendidikan dapat dipahami sebagai bentuk pemenuhan kewajiban sosial dalam menjaga keberlangsungan proses pencarian ilmu.

Konsep *al-mas'uliyah* atau tanggung jawab kepemimpinan juga tampak kuat dalam implementasi strategi ini. Dinas Pendidikan tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai penyelenggara layanan pendidikan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan masyarakat memperoleh hak pendidikannya. Langkah penjangkauan langsung kepada ATS menunjukkan bahwa pemerintah berusaha hadir secara aktif dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Tindakan tersebut sejalan dengan prinsip kepemimpinan Islam yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan dan penanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Implementasi strategi ini juga dapat dipahami sebagai bentuk upaya mencegah lahirnya generasi yang lemah sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 9. Putus sekolah berpotensi melahirkan berbagai persoalan lanjutan seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kerentanan ekonomi, serta terbatasnya peluang mobilitas sosial di masa depan. Oleh sebab itu,

¹⁰² Mifthahul Jannah and Meyniar Albina, 'Hakikat Masyarakat Dan Implikasinya Dalam Filsafat Pendidikan Islam', *Aksi Kolektif: Jurnal Pengabdian* 1, no. 2 (2025): 39–49.

setiap upaya untuk mengembalikan anak ke dalam layanan pendidikan pada hakikatnya merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas generasi. Penanganan ATS tidak hanya menyelesaikan persoalan pendidikan saat ini, tetapi juga mencegah munculnya berbagai masalah sosial pada masa yang akan datang.

Prinsip keadilan sosial dalam QS. An-Nahl ayat 90 juga tercermin dalam implementasi strategi yang dilakukan. Kehadiran program penanganan ATS menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah kepada kelompok yang rentan kehilangan akses pendidikan. Anak-anak yang sebelumnya berada di luar sistem pendidikan diberikan kesempatan untuk kembali memperoleh hak yang sama sebagaimana anak-anak lainnya. Dengan demikian, implementasi strategi tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif berupa penurunan angka ATS, tetapi juga mengandung misi yang lebih substantif, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi strategi penanganan ATS di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaannya, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menerjemahkan rencana menjadi tindakan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Implementasi yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi, penjangkauan sosial, dan fasilitasi pendidikan memperlihatkan adanya upaya untuk membangun layanan pendidikan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan.

C. Faktor Pendukung, Penghambat, dan Evaluasi Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Menangani ATS Tingkat SMP

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam siklus strategi karena menentukan sejauh mana program yang telah dijalankan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan.¹⁰³ Perspektif strategi yang dikemukakan Fred R. David menempatkan evaluasi sebagai fase akhir yang berfungsi mengukur keberhasilan implementasi sekaligus menemukan berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki pada periode berikutnya. Pada konteks penanganan ATS di Kabupaten Malang, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif untuk menyusun laporan, tetapi menjadi instrumen pengendalian kebijakan agar program yang telah dilaksanakan benar-benar menghasilkan penurunan jumlah anak yang tidak bersekolah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan melalui pemantauan data ATS secara berkala, rapat koordinasi antarbidang, serta verifikasi terhadap perkembangan anak yang telah mendapatkan intervensi program. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak berhenti pada pengukuran jumlah kegiatan yang terlaksana, melainkan diarahkan untuk mengetahui dampak nyata dari strategi yang telah diterapkan. Fokus evaluasi yang bertumpu pada perubahan data ATS memperlihatkan bahwa keberhasilan program diukur melalui indikator yang konkret dan dapat diverifikasi.

Perspektif Fred R. David menjelaskan bahwa evaluasi strategi harus mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar, yaitu apakah tujuan telah tercapai, apakah

¹⁰³ Arobi Zulkarnain et al., 'Optimalisasi Indikator Program Dalam Manajemen Strategi Pendidikan: Evaluasi, Implementasi, Dan Dampaknya', *Journal of Islamic Education El Madani* 5, no. 1 (2025): 47–58, <https://doi.org/10.55438/jiee.v5i1.162>.

strategi yang digunakan masih relevan, dan apakah diperlukan tindakan korektif untuk meningkatkan efektivitas program.¹⁰⁴ Berdasarkan kerangka tersebut, evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa strategi penanganan ATS tidak berjalan secara statis. Data yang terus diperbarui memungkinkan instansi melihat perkembangan jumlah ATS dari waktu ke waktu sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan yang terus berubah.

Keberadaan *Dashboard* ATS menjadi instrumen yang sangat menentukan dalam proses evaluasi. Sistem tersebut memungkinkan perubahan data dapat dipantau secara lebih cepat dibandingkan mekanisme pelaporan konvensional. Anak yang sebelumnya tercatat sebagai ATS dapat diketahui status perkembangannya setelah mendapatkan intervensi dari pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi telah bergerak ke arah sistem pengawasan berbasis data yang lebih terukur dan akuntabel.

Karakteristik evaluasi tersebut memperlihatkan kesesuaian dengan konsep strategi Siagian yang menempatkan pengambilan keputusan sebagai proses berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan informasi mengenai keberhasilan program, tetapi juga menjadi dasar bagi lahirnya keputusan-keputusan baru. Data yang diperoleh dari proses evaluasi kemudian digunakan untuk menentukan wilayah prioritas, memperbaiki pola pendampingan, serta mengidentifikasi kelompok ATS yang memerlukan pendekatan khusus. Keputusan strategis yang diambil setelah evaluasi menunjukkan bahwa proses penanganan

¹⁰⁴ David, *Strategic Management Concepts and Cases* (Prentice hall, 2011).

ATS berlangsung dalam siklus yang saling berkelanjutan antara perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan kebijakan.

Kajian ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya berorientasi pada pengukuran dampak jangka panjang. Fokus evaluasi masih banyak diarahkan pada perubahan status ATS dan keberhasilan mengembalikan anak ke satuan pendidikan. Indikator tersebut memang penting karena berkaitan langsung dengan target program, namun belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan pendidikan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menjadi catatan penting karena persoalan ATS pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga keberlanjutan pendidikan. Faktor ekonomi keluarga, lingkungan sosial, rendahnya motivasi belajar, hingga budaya kerja pada usia sekolah dapat kembali mendorong anak keluar dari sistem pendidikan meskipun sebelumnya telah berhasil dikembalikan ke sekolah. Evaluasi yang hanya berfokus pada jumlah anak yang kembali bersekolah berpotensi mengabaikan risiko munculnya ATS baru pada masa mendatang.

Perspektif Islam memandang evaluasi sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan (al-mas'uliyah). Hadis *kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi* menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang berada di bawah pengelolaannya.¹⁰⁵ Dalam konteks ini, evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan bukan sekadar kewajiban birokratis, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral untuk memastikan hak pendidikan masyarakat benar-benar terpenuhi. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari

¹⁰⁵ Mulyawan Safwandy Nugraha et al., *Hadis Manajemen Pendidikan Islam* (Pena Langit Publishing, 2026).

terselenggaranya kegiatan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik.

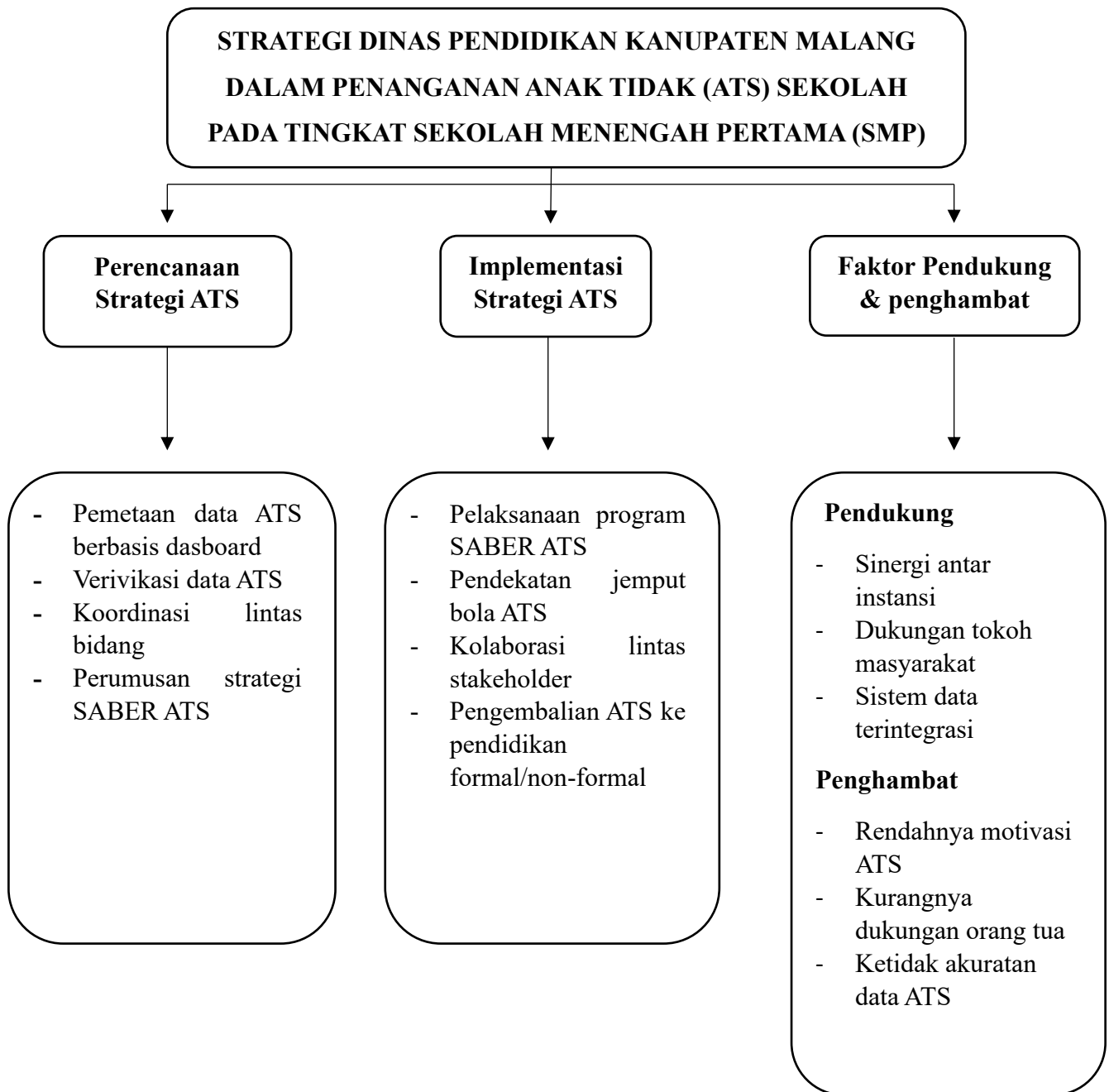
Nilai tanggung jawab tersebut tampak dalam upaya pemantauan berkelanjutan terhadap data ATS. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa masalah pendidikan tidak dapat diselesaikan melalui intervensi sesaat. Proses pengawasan yang terus dilakukan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa anak-anak yang telah memperoleh akses pendidikan tetap berada dalam sistem pendidikan formal. Praktik ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan publik dalam Islam.

Perspektif pencegahan generasi lemah sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa ayat 9 juga memberikan landasan yang kuat terhadap pentingnya evaluasi.¹⁰⁶ Ayat tersebut mengandung pesan agar setiap generasi dipersiapkan menjadi generasi yang kuat dan tidak berada dalam kondisi rentan. Penanganan ATS pada hakikatnya merupakan upaya mencegah lahirnya generasi yang mengalami keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan kesempatan hidup.

Keberadaan sistem evaluasi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah berupaya menjalankan prinsip pengelolaan strategi secara sistematis. Evaluasi tidak hanya menghasilkan informasi mengenai capaian program, tetapi juga menyediakan dasar bagi penyempurnaan kebijakan pada periode berikutnya. Meskipun demikian, penguatan indikator evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada jumlah ATS, melainkan juga keberlanjutan pendidikan dan dampak sosial jangka panjang.

¹⁰⁶ *Mencetak Generasi Qur'ani yang Berkarakter dan Berintegritas.*

D. Bagan Hasil Temuan Penelitian



Gambar 5.1 Bagan Temuan Penelitian

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka dapat ditarik kesimpulan secara komprehensif sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Menangani ATS Tingkat SMP.

Perencanaan strategi penanganan ATS di Kabupaten Malang dibangun di atas kerangka tata kelola pemerintahan berbasis data (*data-driven governance*). Dinas Pendidikan mengintegrasikan data makro yang bersumber dari *Dashboard* ATS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengidentifikasi tipologi ATS secara spesifik, baik anak yang putus sekolah (*drop out*), belum pernah bersekolah, maupun yang lulus Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Proses perencanaan ini diperkuat melalui koordinasi kolegal lintas sektor yang intensif, baik secara internal melibatkan Bidang Pembinaan SMP serta Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, maupun eksternal dengan melibatkan pihak sekolah, Pemerintah Desa, dan Kecamatan demi menyinkronkan data digital pusat dengan realitas faktual di lapangan.

2. Implementasi Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Menangani ATS Tingkat SMP.

Implementasi strategi ini diwujudkan secara konkret melalui inovasi program Saber ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah) yang diintegrasikan dengan SIM Saber ATS sebagai instrumen pelacakan. Eksekusi program menggunakan mekanisme kolaborasi multi-aktor yang melibatkan jajaran sekolah, perangkat desa, hingga pengurus RT/RW untuk melakukan pendekatan persuasif secara langsung (*door-to-door*) ke rumah warga. Proses pengembalian hak belajar anak diakomodasi melalui dua jalur, yaitu jalur formal (reintegrasi ke SMP dengan bantuan beasiswa/PIP bagi yang terkendala biaya) dan jalur non-formal (pengalihan ke PKBM program Paket B bagi anak yang terkendala usia atau sudah bekerja).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Strategi.

Faktor pendukung utama program ini adalah adanya komitmen sinergis antara pemerintah daerah dan pusat, keterlibatan aktif tokoh masyarakat/agama sebagai mediator persuasif, serta tersedianya sistem *Dashboard* data yang mempermudah monitoring. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi kompleksitas masalah internal anak yang sudah nyaman bekerja, rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan, kendala kemiskinan struktural, serta ketidaksesuaian data di lapangan akibat tingginya mobilitas atau perpindahan domisili penduduk

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang disarankan untuk meningkatkan sinkronisasi data pada SIM Saber ATS secara *real-time* dengan mengoneksikannya langsung pada sistem data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna meminimalkan kegagalan pelacakan akibat migrasi penduduk. Selain itu, alokasi kuota dan ketepatan sasaran bantuan finansial atau beasiswa daerah perlu terus dioptimalkan secara berkelanjutan guna menjamin rentensi belajar anak agar tidak mengalami putus sekolah untuk kedua kalinya akibat tekanan ekonomi. Dinas Pendidikan juga perlu menggandeng Kementerian Agama dan KUA setempat untuk melakukan sosialisasi edukatif lintas sektoral mengenai dampak pernikahan dini dan pentingnya pemenuhan wajib belajar 9 tahun guna mengikis hambatan kultural di masyarakat.

2. Bagi Lembaga Pendidikan (Sekolah dan PKBM).

Pihak SMP formal disarankan membangun mekanisme *early warning system* berbasis absensi dan konseling untuk mendeteksi secara dini siswa yang menunjukkan gejala rentan putus sekolah, sehingga tindakan preventif dapat segera diambil. Sementara itu, pihak pengelola PKBM diharapkan terus meningkatkan fleksibilitas ruang belajar serta memperkaya kurikulum berbasis kecakapan hidup (*life skills*) dan vokasional agar dapat memberi nilai tambah ekonomi yang realistis bagi anak-anak Paket B yang harus menempuh pendidikan sambil bekerja.

3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua.

Kepada masyarakat luas, khususnya pihak orang tua, diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif untuk menempatkan pendidikan anak sebagai

investasi masa depan yang utama serta berkomitmen memberikan dukungan moral yang utuh kepada anak. Masyarakat di tingkat RT/RW juga diimbau untuk lebih peduli dan proaktif memanfaatkan kanal aduan digital yang tersedia dalam sistem Saber ATS apabila menemui anak usia sekolah yang tidak bersekolah di lingkungan sekitar mereka.

4. Bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

Mahasiswa MPI diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memperdalam kajian mengenai tata kelola dan kepemimpinan pendidikan, khususnya dalam mengelola program pendidikan non-formal dan kesetaraan (seperti PKBM). Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, misalnya dengan membantu sosialisasi literasi pendidikan atau menjadi relawan pengajar bagi anak-anak pasca-reintegrasi, sebagai bentuk nyata penerapan nilai-nilai dakwah dan amanah kepemimpinan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Mengingat penelitian ini masih terbatas pada analisis manajemen strategi pemulihan akses atau aspek kuantitas, disarankan untuk memperluas lokus kajian pada aspek kualitas. Penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi efektivitas adaptasi kurikulum bagi mantan ATS, tingkat ketahanan (*survival rate*) anak setelah kembali ke sekolah, maupun analisis dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari keberadaan program Saber ATS ini di Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah, Siti Nur, Silvia Dwi Nur Kamalia, Dewi Ismayani Gendra Bawana, Zahrotun Fisabil Jannah, and Arie Yuanita. 'Membaca Kritis: Bagaimana Mengidentifikasi Informasi Yang Akurat'. *PIJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 3,no.2 (2025): 187–98. <https://doi.org/10.58540/pijar.v3i2.795>.
- Aristin, Nevy Farista. 'Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kecamatan Bondowoso'. *Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, Dan Praktek Dalam Bidang Pendidikan Dan Ilmu Geografi* 20, no. 1 (2024): 4.
- Astuti, Tri Puji. 'Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan'. *JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN* 22, no. 2 (2024): 101–21. <https://doi.org/10.54911/litbang.v22i2.779>.
- David, Fred R. *Strategic Management Concepts and Cases*. Prentice hall, 2011. https://www.strategyclub.com/wpcontent/uploads/2015/10/Preface.16th.ed_.pdf.
- David, Fred R. *Strategic Management Concepts and Cases*. Prentice hall, 2011. https://www.strategyclub.com/wp-content/uploads/2015/10/Preface.16th.ed_.pdf.
- David, Fred R. *Strategic Management Concepts and Cases*. Prentice hall, 2011. https://www.strategyclub.com/wpcontent/uploads/2015/10/Preface.16th.ed_.pdf.
- Dayana, Selvi, Kurniawan Kurniawan, and Muksal Mina Putra. 'Analisis Faktor Ekonomi Terhadap Tingkat Drop Out Siswa Di Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong'. PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/8055/>.
- Eslamian, Ayoub, Maliheh Arshi, Siyamak Tahmasebi, Fardin Alipour, and Hassan Rafiey. 'Scoping Review on Interventions, Actions, and Policies Affecting Return to School and Preventing School Dropout in Primary School'. *International Journal of Preventive Medicine* 14, no. 1 (2023): 92.
- Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Farid, Ahmad, Supadi Supadi, Heru Santosa, and Asdi Wiharto. 'Analisis Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)'. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 1–21.

- HIDAYAT, NUR. ‘Penerapan Evidence Based Policy Dalam Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar= The Implementation of Evidence-Based Policy in Population Administration Service Innovation at the Department of Population and Civil Registration of Makassar City’. PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2016. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/53986/>.
- Hidayat, Rachmat, Rafika Amelia Fitri, and Dina Hermina. ‘LANGKAH PENELITIAN MANAJEMEN PENDIDIKAN: PENEMUAN MASALAH, TELAAH PUSTAKA, PERSIAPAN PENELITIAN, PENGUMPULAN DATA, ANALISIS DATA DAN PENYIMPULAN/PEMAKNAAN, DAN PELAPORAN & EVALUASI PENELITIAN’. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 509–23. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.509>.
- IDalamat.com. ‘Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang’. IDalamat.com. Accessed 12 June 2026. <https://idalamat.com/alamat/12535/kantor-dinas-pendidikan-kabupaten-malang>.
- Jannah, Mifthahul, and Meyniar Albina. ‘Hakikat Masyarakat Dan Implikasinya Dalam Filsafat Pendidikan Islam’. *Aksi Kolektif: Jurnal Pengabdian* 1, no. 2 (2025): 39–49.
- Kemendikdasmen. ‘Data Anak Tidak Sekolah (ATS)’. n.d. Accessed 9 March 2026. <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/index.php/Dashboard-ats>.
- Kemendikdasmen. *Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)*. n.d. Accessed 9 March 2026. <https://duniapenfi.kemendikdasmen.go.id/program-prioritas/relawan-pendidikan>.
- Khairani, Azka, Nafisa Insani Hakiki, and Muhamad Yopan. ‘Analisis Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah Di Tingkat SD Dan SMP Di Papua: Kajian Studi Pustaka Berbasis Teori Struktural’. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 45–51.
- Kusumajanti, Kusumajanti, Syarifuddin Syarifuddin, Henny Sanulita, and Gopur Gopur. *Metodologi Penelitian Kualitatif:: Teori Dan Paradigma Baru Bidang Ilmu Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Lanawaang, Janeman Jehezkiel, and Romi Mesra. *Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kelurahan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, Dan 3 UUD 1945*. 9, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.5103>.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Limbong, Elsi Salu, Arie Purnomo, and Wahyudin Halik. ‘Strategi Pemerintah Kota Sorong Dalam Mengatasi Tantangan Anak Putus Sekolah’. *Jurnal Maladum* 3, no. 1 (2025): 29–40. <https://doi.org/10.33506/jm.v3i1.4725>.

- Lini, Langi Sofiana Sarah, Ferdinand Karebumbu, and Grace Soputan. 'Analisis Anak Putus Sekolah Tingkat SMP Di Desa Lemoh Timur'. *JIPSINDO* 8, no. 2 (2021): 165–82. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v8i2.42659>.
- Maslukha, Eka, Daryono Daryono, and M. Bayu Firmansyah. *Faktor Penentu Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kelanjutan Pendidikan dalam Era Wajib Belajar 12 Tahun | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 2026. <http://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/10225>.
- Mencetak Generasi Qur'ani yang Berkarakter dan Berintegritas: Kajian Teks dalam Surat An-Nisa' Ayat 9 di Era Digital | Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*. n.d. Accessed 13 June 2026. <https://ejournal.undar.or.id/index.php/sumbula/article/view/1047>.
- Mujib, Al, Rukyaton Ulya, and Muhammad. 'Analisis Kedudukan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional'. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)* 6, no. 2 (2025): 735–39. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v6i2.967>.
- Mulyawan Safwandy Nugraha, Ahmad Riyadi, Aulia Silmi, et al. *Hadis Manajemen Pendidikan Islam*. Pena Langit Publishing, 2026.
- Murhadi, Werner Ria. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Ekuitas Publisher, 2025. <https://repository.ubaya.ac.id/48121/>.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, and Rusdy Abdullah Sirodj. 'Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif'. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.
- Nurhakim, Haditsa Qur'ani, Arif Rahman Hakim, Basuki, Mamat Rahmat, Supiana, and Qiqi Yulianti Zakiah. 'PERUMUSAN, FORMULASI, DAN ADOPSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN'. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 7, no. 4 (2025): 682–96. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i4.2655>.
- Nurrisa, Fahriana, and Dina Hermina. 'Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data'. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran | E-ISSN: 3026-6629* 2, no. 3 (2025): 793–800.
- Palguna, I. Dewa Gede, and Bima Kumara Dwi Atmaja. 'Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 350–70. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Pasal 12 (n.d.).

- Resta, Febrina Anda, Harisnawati Harisnawati, and Waza Karia Akbar. 'Strategi Mencegah Anak Putus Sekolah Dasar Di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok'. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 6035–44. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.17010>.
- Rokhmaniyah, Kartika Chrysti Suryandari, Siti Fatimah, and Umi Mahmudah. *Anak Putus Sekolah, Dampak, dan Strategi Mengatasinya*. CV Pajang Putra Wijaya, 2022.
- Sandhopa, Lennanda. 'ANALISIS PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH DI DESA BANDUNG JAYA KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHANG'. Diploma, IAIN BENGKULU, 2019. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3436/>.
- Sari, Indah Wulan. 'Government Policy Strategies of Bandar Lampung City in Reducing School Dropout Rates'. *Jurnal Kebijakan Publik* 16, no. 3 (2025): 251–58. <https://doi.org/10.31258/jkp.v16i3.8877>.
- Siagian, Sondang P. 'Manajemen Strategik, Bumi Aksara'. Jakarta, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2021.
- Suharti, Jeni, and Haifaturrahmah Haifaturrahmah. 'Pentingnya Pendidikan Sebagai Fondasi Pembangunan Bangsa'. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran | E-ISSN : 3026-6629* 3, no. 2 (2025): 593–96.
- Sukarma, I. Ketut, Tungga Bhimadi Karyasa, Hasim Hasim, Asfahani Asfahani, and Achmad Abdul Azis. 'Mengurangi Ketimpangan Sosial Melalui Program Bantuan Pendidikan Bagi Anak-Anak Kurang Mampu'. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2023): 8440–47.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. 'MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER'. *EDU RESEARCH* 5, no. 3 (2024): 110–16. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.
- Susanto, Dedi, and M. Syahrani Jailani. 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah'. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Tohani, Entoh. *Hubungan Dialektis Pendidikan dan Pembangunan*. UNY Press, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 Ayat (1)*. n.d.
- Wika, Martinus. 'Antara Komitmen Dan Realita: Studi Kualitatif Terhadap Kebijakan Pemerataan Pendidikan Di Wilayah Terpencil Merauke'. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (2025): 89–96. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.376>.

Zulkarnain, Arobi, Ahmad Majidan Tanzihul Ali, Vian Sabrina Herawati, Dita Nofiyanti, and Mardiyah Mardiyah. 'Optimalisasi Indikator Program Dalam Manajemen Strategi Pendidikan: Evaluasi, Implementasi, Dan Dampaknya'. *Journal of Islamic Education El Madani* 5, no. 1 (2025): 47–58. <https://doi.org/10.55438/jiee.v5i1.162>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faksimile (0341) 552398 Malang
http://fkip.uin-malang.ac.id email : fkip@uin-malang.ac.id

Nomor : 836/Un.03.1/TL.01.04/04/2026 28 April 2026
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : Muhammad Nouval Hilmy
NIM : 220106110092
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Semester-Tahun Akademik : Genap - 2025/2026
Judul Skripsi : Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama
Lama Penelitian : April 2026 sampai dengan Juni 2026 (3 bulan)

Di berikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang secara offline.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik di sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Muhammad Walid, MA
NIP. 19730823 200003 1 002

Tembusan :
1. Yth. Ketua Prodi MPI
2. Arsip

 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Penarukan Nomor 1 Kapanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/ Faksimile (0341) 393935/393937 Laman: dispendik.malangkab.go.id
Pos-el: dispendik@malangkab.go.id, Kode Pos: 65163

SURAT IZIN
NOMOR : 800.1.2.2/1533/35.07.301/2026
TENTANG
Penelitian di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Dasar : Surat Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor:836/Un.03.1/TL.01.04/04/2026 tanggal 28 April 2026 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini:

MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama : Muhammad Nouval Hilmy
NIM : 220106110092
Program Studi : S1 Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Alamat : Jalan Gajayana No.50, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang.
Untuk : Melaksanakan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada bulan April s.d Juni 2026 dengan Judul Penelitian "Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama", secara teknis agar dikoordinasikan dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

Kapanjen, 9 Mei 2026
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Sekretaris

ROSYTA DEWI S.H., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197208041998032009

Lampiran 2 Dokumentasi



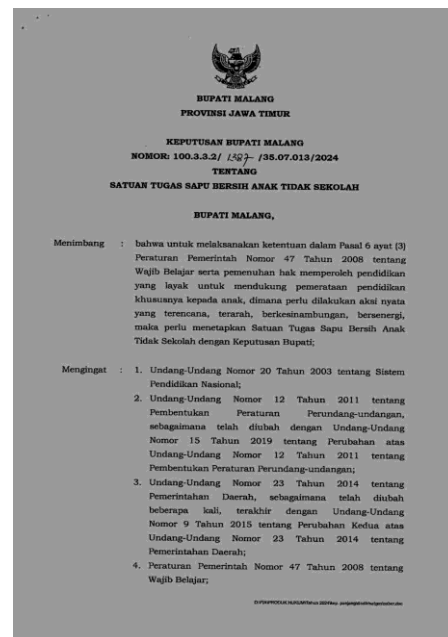
Dokumentasi wawancara Ibu Muthoharoh, S.M. Kepala Seksi Kesiswaan SMP



Dokumentasi wawancara Ibu Dewi Ruhillah, S.Pd. Kepala Seksi PAUD



Dokumentasi wawancara Ibu Nila Mayasari Administrasi Perkantoran



SK Satuan Tugas Saber ATS

<https://drive.google.com/file/d/1Ahk-ZIbaqKUc2Dvz2Gz5rKZBJL0EJIPh/view?usp=drivesdk>



Pedoman penanganan ATS

https://drive.google.com/file/d/1JexWNMYvZv21owGB34k5SorDhkAL_y31/view?usp=drivesdk

Lampiran 3 Observasi



Launching program SABER ATS



Foto dokumentasi kegiatan Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah



Lampiran 4 Instrumen Wawancara

Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan
1. Bagaimana perencanaan strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam menangani ATS tingkat SMP?	Proses perencanaan strategi	Bagaimana proses perencanaan strategi penanganan ATS di Kabupaten Malang?
	Landasan kebijakan	Apa dasar kebijakan atau regulasi yang digunakan dalam merumuskan strategi tersebut?
	Mekanisme pendataan ATS	Bagaimana mekanisme pendataan ATS di tingkat SMP?
	Rencana jangka panjang	Apa rencana jangka panjang dinas dalam menangani ATS di jenjang SMP?
2. Bagaimana implementasi strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam menangani ATS tingkat SMP?	Program penanganan ATS	Program apa saja yang sudah dijalankan untuk menekan angka ATS di jenjang SMP?
	Kerja sama dan koordinasi	Bagaimana bentuk kerja sama dengan sekolah, masyarakat, dan lembaga lain dalam implementasi strategi?
	Program penarikan kembali ATS	Apakah ada program khusus untuk menarik kembali anak putus sekolah ke jalur pendidikan formal atau kesetaraan?
	Dampak program	Bagaimana dampak program terhadap penurunan angka ATS di Kabupaten Malang?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam menangani ATS tingkat SMP?	Faktor pendukung	Faktor apa yang paling mendukung keberhasilan strategi penanganan ATS?
	Faktor penghambat	Kendala utama apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program?
	Upaya mengatasi hambatan	Bagaimana cara dinas mengatasi hambatan tersebut?

	Evaluasi program	Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas program penanganan ATS yang sudah berjalan?
	Indikator keberhasilan	Apakah ada indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur capaian strategi?
Data Pendukung Penelitian	Rekomendasi	Apa rekomendasi dinas untuk sekolah dan masyarakat agar lebih aktif mencegah anak putus sekolah?
	Pandangan terhadap penelitian	Bagaimana dinas melihat peran penelitian akademik seperti skripsi ini dalam mendukung kebijakan pendidikan?

Lampiran 5 Transkrip Wawancara

Nama narasumber : Ibu Muthoharoh, S.M.

Jabatan : Kepala Seksi Kesiswaan SMP

Instansi : Dinas Pendidikan Kab. Malang

Hari/tanggal : Selasa, 12 Mei 2026

Pukul : 09.00 WIB

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1	Bagaimana proses perencanaan strategi penanganan ATS di Kabupaten Malang?	Jadi sebelum ada program Saber ATS ini, sebenarnya kami belum terlalu fokus pada penanganan ATS secara khusus. Waktu itu fokus kami masih pada pendataan dulu, karena kami perlu mengetahui sebenarnya jumlah ATS di Kabupaten Malang itu berapa. Setelah pendataannya selesai dan ternyata prevalensinya cukup tinggi, akhirnya kami mengadakan rapat bersama. Semua bidang kami libatkan untuk merumuskan strategi dan program yang bisa digunakan untuk menangani ATS ini.
2	Apa dasar kebijakan atau regulasi yang digunakan dalam merumuskan strategi tersebut?	Kalau dasar kebijakannya dari Permendikbud. Selain itu juga ada SK dan beberapa petunjuk teknis yang menjadi acuan kami dalam menjalankan program. Nanti untuk SK-nya bisa saya fotokan.
3	Bagaimana mekanisme pendataan ATS di tingkat SMP?	Mekanisme pendataannya melalui <i>Dashboard</i> ATS dari Kemendikdasmen. Jadi di <i>Dashboard</i> itu sudah tersedia data ATS mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten dan sekolah. Jadi kami tidak mendata secara manual, tetapi menggunakan sistem yang sudah disediakan oleh kementerian.
4	Program apa saja yang sudah dijalankan untuk menekan angka ATS di jenjang SMP?	Program utama kami namanya Saber ATS atau Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah. Mekanismenya kami bekerja sama dengan kecamatan untuk melakukan verifikasi data. Dari kecamatan nanti diteruskan ke desa untuk menggali informasi lebih lanjut terkait anak yang bersangkutan. Kalau memang penyebabnya faktor ekonomi dan masih usia sekolah, kami upayakan kembali ke sekolah dengan bantuan beasiswa. Kalau sudah tidak usia sekolah, kami arahkan ke program kesetaraan.

5	Bagaimana bentuk kerja sama dengan sekolah, masyarakat, dan lembaga lain dalam implementasi strategi?	Untuk penanganan ATS ini kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami bekerja sama dengan pihak sekolah karena sekolah menjadi ujung tombak dalam pendataan dan pemantauan anak yang berpotensi putus sekolah. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan kecamatan, desa, PKBM, tokoh masyarakat, bahkan RT dan RW. Mereka membantu kami dalam proses verifikasi data dan pendekatan kepada keluarga ATS karena biasanya mereka lebih memahami kondisi masyarakat setempat.
6	Apakah ada program khusus untuk menarik kembali anak putus sekolah ke jalur pendidikan formal atau kesetaraan?	Kalau program khusus ya melalui Saber ATS itu tadi. Dari kecamatan akan ditindaklanjuti ke desa. Nah dari desa ini bisa melalui RT, RW, tokoh masyarakat, bahkan lembaga sosial yang ada. Selain itu kami juga menawarkan pendidikan kesetaraan, LKP, dan program kursus keterampilan sebagai bekal bagi anak-anak yang tidak bisa kembali ke sekolah formal.
7	Faktor apa yang paling mendukung keberhasilan strategi penanganan ATS?	Kalau di sini yang paling penting ya sinergi semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, desa, sekolah, orang tua, sampai anaknya sendiri. Dalam hal ini tokoh masyarakat juga sangat penting karena biasanya mereka lebih didengar oleh masyarakat dibandingkan kami dari dinas. Selain itu sosialisasi yang dilakukan secara masif juga sangat membantu keberhasilan program.
8	Kendala utama apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program?	Kendalanya macam-macam. Ada anak yang memang sudah tidak mau sekolah lagi. Ada juga orang tua yang kurang mendukung atau kurang bisa memberikan motivasi kepada anaknya. Selain itu ada beberapa wilayah yang kurang aktif dalam pelaksanaan program. Kendala lain yang cukup besar adalah keterbatasan anggaran dan bantuan karena jumlah ATS yang ada jauh lebih banyak dibandingkan bantuan yang bisa kami berikan.
9	Bagaimana cara dinas mengatasi hambatan tersebut?	Kalau hambatannya dari anak atau keluarga, biasanya kami melakukan pendekatan yang lebih intensif. Bisa melalui sekolah, desa, maupun tokoh masyarakat. Kalau terkait dana, kami terus mengusulkan tambahan bantuan dan kuota BIP atau Program Indonesia Pintar ke pemerintah pusat supaya lebih banyak anak yang bisa terbantu.
10	Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas	Evaluasi biasanya kami lakukan melalui monitoring data ATS yang ada di <i>Dashboard</i> .

	program penanganan ATS yang sudah berjalan?	Dari situ bisa dilihat apakah jumlah ATS mengalami penurunan atau tidak. Selain itu kami juga melakukan rapat evaluasi dengan kecamatan, desa, dan pihak terkait lainnya untuk mengetahui kendala yang terjadi di lapangan sekaligus mencari solusi untuk perbaikan program ke depannya.
11	Apakah ada indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur capaian strategi?	Indikator yang paling mudah dilihat tentu berkurangnya angka ATS. Ketika ATS sudah berhasil ditangani dan kembali ke sekolah, otomatis datanya akan hilang dari <i>Dashboard</i> ATS karena sudah ditarik kembali oleh sekolah ke dalam sistem pendidikan. Jadi kami bisa memantau secara langsung perkembangan penanganannya.
12	Bagaimana dampak program terhadap penurunan angka ATS di Kabupaten Malang?	Dampaknya cukup baik karena setelah adanya program Saber ATS, pendataan ATS menjadi lebih terstruktur dan penanganannya juga lebih fokus. Banyak ATS yang sebelumnya belum teridentifikasi akhirnya bisa ditemukan dan ditindaklanjuti. Sebagian anak berhasil kembali ke sekolah formal dan sebagian lainnya mengikuti pendidikan kesetaraan. Walaupun masih ada ATS yang belum tertangani sepenuhnya, program ini cukup membantu dalam menekan jumlah ATS di Kabupaten Malang.
13	Apa rencana jangka panjang dinas dalam menangani ATS di jenjang SMP?	Untuk jenjang SMP kemarin ada wacana memberikan fasilitas sekolah seperti seragam dan buku karena memang salah satu penyebab ATS adalah faktor ekonomi. Selain itu kami juga terus mengupayakan penambahan kuota BIP. Jumlah anak tidak mampu di Kabupaten Malang cukup banyak, sementara kuota yang tersedia masih terbatas. Harapannya sekitar 60–70 persen ATS dari keluarga kurang mampu bisa tercover oleh bantuan tersebut. Adanya BIP ini sangat membantu karena bisa digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan biaya transportasi.
14	Apa rekomendasi dinas untuk sekolah dan masyarakat agar lebih aktif mencegah anak putus sekolah?	Dari dinas kami selalu menekankan bahwa penanganan ATS merupakan tanggung jawab bersama, tetapi sekolah menjadi ujung tombaknya. Kami selalu menyosialisasikan kepada sekolah untuk mencari tahu mengapa anak sampai tidak melanjutkan sekolah dan apa penyebabnya. Dari sekolah nanti data tersebut diinput dan dilaporkan. Selain itu kami juga

		terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan, apalagi sekarang ada program wajib belajar 13 tahun. Karena itu kami terus berupaya menggaungkan pentingnya pendidikan kepada masyarakat.
15	Bagaimana dinas melihat peran penelitian akademik seperti skripsi ini dalam mendukung kebijakan pendidikan?	Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kadang dari penelitian mahasiswa yang datang ke kami justru membuka wawasan baru. Ada beberapa hal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kami, tetapi muncul dari ide dan gagasan penelitian mahasiswa. Hal-hal seperti itu kemudian bisa kami kaji lebih dalam. Termasuk penelitian tentang ATS ini, menurut saya bisa menjadi masukan yang baik bagi kami untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

Nama narasumber : Ibu Dewi Ruhillah, S.Pd.

Jabatan : Kepala Seksi PAUD

Instansi : Dinas Pendidikan Kab. Malang

Hari/tanggal : Selasa, 12 Mei 2026

Pukul : 11.00 WIB

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1	Bagaimana proses perencanaan strategi penanganan ATS di Kabupaten Malang?	Kalau dari bidang kami, proses perencanaan biasanya diawali dengan melihat data ATS yang sudah tersedia dari <i>Dashboard</i> ATS. Setelah data tersebut diperoleh, kami melakukan pembahasan bersama dengan bidang terkait untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Dari hasil pembahasan tersebut kemudian dirumuskan langkah-langkah yang dianggap paling sesuai untuk menangani ATS. Karena persoalan ATS cukup kompleks, maka penyusunannya melibatkan berbagai pihak dan tidak hanya dilakukan oleh satu bidang saja.
2	Apa dasar kebijakan atau regulasi yang digunakan dalam merumuskan strategi tersebut?	Dasarnya tentu mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan wajib belajar dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Selain itu juga terdapat petunjuk teknis dan berbagai regulasi yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program. Kami di daerah menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Malang.
3	Bagaimana mekanisme pendataan ATS di tingkat SMP?	Saat ini pendataan ATS sudah menggunakan sistem yang terintegrasi melalui <i>Dashboard</i> ATS dari kementerian. Data yang muncul kemudian diverifikasi kembali oleh pihak terkait untuk memastikan bahwa kondisi anak yang tercatat memang sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Dengan sistem tersebut proses pendataan menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya.
4	Program apa saja yang sudah dijalankan untuk menekan angka ATS di jenjang SMP?	Salah satu program yang cukup aktif dijalankan adalah Saber ATS. Program ini berfokus pada pendataan, verifikasi, dan penjangkauan ATS yang ada di lapangan. Selain itu juga dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan serta upaya

		menghubungkan ATS dengan layanan pendidikan formal maupun nonformal yang tersedia.
5	Bagaimana bentuk kerja sama dengan sekolah, masyarakat, dan lembaga lain dalam implementasi strategi?	Kerja sama dilakukan dengan banyak pihak, mulai dari sekolah, pemerintah desa, kecamatan, PKBM, hingga tokoh masyarakat. Masing-masing memiliki peran yang berbeda sesuai tugas dan kewenangannya. Sekolah misalnya membantu mengidentifikasi anak yang berpotensi putus sekolah, sedangkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat membantu dalam proses pendampingan dan penjangkauan ATS di lingkungan masing-masing.
6	Apakah ada program khusus untuk menarik kembali anak putus sekolah ke jalur pendidikan formal atau kesetaraan?	Ada. Bagi anak yang masih memungkinkan untuk kembali ke sekolah formal akan didorong agar melanjutkan pendidikan kembali. Sedangkan bagi anak yang sudah cukup lama meninggalkan sekolah atau memiliki kendala tertentu, biasanya diarahkan ke pendidikan kesetaraan melalui PKBM sehingga mereka tetap dapat memperoleh layanan pendidikan.
7	Faktor apa yang paling mendukung keberhasilan strategi penanganan ATS?	Menurut saya faktor yang paling mendukung adalah adanya sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga. Ketika semua pihak memiliki kepedulian yang sama terhadap pendidikan anak, proses penanganan ATS akan lebih mudah dilakukan. Selain itu kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi faktor yang sangat menentukan.
8	Kendala utama apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program?	Kendala yang paling sering ditemui biasanya berasal dari faktor ekonomi dan rendahnya motivasi anak untuk kembali bersekolah. Ada juga beberapa anak yang sudah bekerja sehingga merasa tidak perlu melanjutkan pendidikan. Selain itu masih ada orang tua yang menganggap pendidikan bukan sebagai prioritas utama sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan ATS.
9	Bagaimana cara dinas mengatasi hambatan tersebut?	Upaya yang dilakukan biasanya melalui pendekatan secara persuasif kepada anak maupun orang tua. Selain itu kami juga berusaha menghubungkan mereka dengan berbagai bantuan pendidikan yang tersedia agar hambatan ekonomi dapat dikurangi. Kami juga melibatkan sekolah dan pemerintah desa agar proses pendampingan dapat berjalan lebih efektif.

10	Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas program penanganan ATS yang sudah berjalan?	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi dan pemantauan data ATS yang tersedia dalam sistem. Dari evaluasi tersebut dapat diketahui perkembangan jumlah ATS, hambatan yang masih muncul di lapangan, serta langkah-langkah yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan program berikutnya.
11	Apakah ada indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur capaian strategi?	Indikator yang paling mudah dilihat tentu berkurangnya jumlah ATS. Selain itu juga dapat dilihat dari bertambahnya jumlah anak yang berhasil kembali memperoleh layanan pendidikan, baik melalui sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan. Hal tersebut menjadi salah satu ukuran keberhasilan program yang dijalankan.
12	Bagaimana dampak program terhadap penurunan angka ATS di Kabupaten Malang?	Menurut saya dampaknya cukup positif. Dengan adanya program yang lebih terarah, banyak ATS yang sebelumnya belum teridentifikasi menjadi lebih mudah ditemukan dan ditangani. Walaupun masih terdapat berbagai tantangan, setidaknya program yang dijalankan sudah membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah.
13	Apa rencana jangka panjang dinas dalam menangani ATS di jenjang SMP?	Ke depan kami berharap sistem pendataan ATS semakin baik dan dukungan bantuan pendidikan semakin luas. Selain itu koordinasi dengan sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat juga akan terus diperkuat. Harapannya angka ATS di Kabupaten Malang dapat terus menurun dan semakin banyak anak yang memperoleh hak pendidikannya.
14	Apa rekomendasi dinas untuk sekolah dan masyarakat agar lebih aktif mencegah anak putus sekolah?	Sekolah perlu lebih aktif memantau peserta didik yang berpotensi putus sekolah dan segera melakukan langkah-langkah pencegahan. Sementara itu masyarakat juga perlu lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Jika ada anak yang tidak bersekolah atau berisiko putus sekolah, sebaiknya segera dikoordinasikan dengan pihak terkait agar dapat segera ditangani.
15	Bagaimana dinas melihat peran penelitian akademik seperti skripsi ini dalam mendukung kebijakan pendidikan?	Menurut saya penelitian akademik memiliki peran yang cukup penting. Dari penelitian seperti ini sering muncul berbagai masukan, temuan, dan sudut pandang baru yang mungkin belum t

Nama narasumber : Ibu Nila Mayasari

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Instansi : Dinas Pendidikan Kab. Malang

Hari/tanggal : Selasa, 12 Mei 2026

Pukul : 14.00 WIB

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1	Bagaimana proses perencanaan strategi penanganan ATS di Kabupaten Malang?	Kalau dari bagian administrasi, kami lebih banyak membantu menyiapkan data yang dibutuhkan oleh bidang terkait. Biasanya data ATS yang masuk dari <i>Dashboard</i> kami rekap dan kami kelompokkan berdasarkan wilayah atau kecamatan. Dari data tersebut nantinya pimpinan dan bidang terkait dapat melihat daerah mana yang membutuhkan perhatian lebih. Jadi kami mendukung proses perencanaan melalui penyediaan data dan administrasi yang diperlukan.
2	Apa dasar kebijakan atau regulasi yang digunakan dalam merumuskan strategi tersebut?	Untuk kebijakan dan regulasi secara rinci biasanya menjadi ranah pimpinan atau bidang yang menangani ATS secara langsung. Kami di bagian administrasi menjalankan tugas sesuai arahan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang kami ketahui, program ATS ini dilaksanakan berdasarkan regulasi dari kementerian dan petunjuk teknis yang diberikan kepada pemerintah daerah.
3	Bagaimana mekanisme pendataan ATS di tingkat SMP?	Pendataannya dilakukan melalui <i>Dashboard</i> ATS dari Kemendikdasmen. Data yang muncul dalam sistem kemudian dipantau dan diperiksa kembali berdasarkan hasil verifikasi dari sekolah, desa, maupun kecamatan. Jika terdapat perbedaan data, maka akan dilakukan pembaruan agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
4	Program apa saja yang sudah dijalankan untuk menekan angka ATS di jenjang SMP?	Yang paling sering kami ketahui dan terlibat dalam administrasinya adalah program Saber ATS. Dalam program tersebut dilakukan pendataan, verifikasi, dan tindak lanjut terhadap ATS yang ditemukan. Dari sisi administrasi kami membantu menyiapkan surat, laporan, serta berbagai kebutuhan dokumen yang

		diperlukan selama pelaksanaan program berlangsung.
5	Bagaimana bentuk kerja sama dengan sekolah, masyarakat, dan lembaga lain dalam implementasi strategi?	Kerja sama yang dilakukan cukup luas karena penanganan ATS memang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sekolah biasanya membantu memberikan informasi terkait peserta didik yang berisiko putus sekolah. Pemerintah desa dan kecamatan membantu proses verifikasi di lapangan, sedangkan masyarakat dan tokoh lingkungan sering membantu memberikan informasi terkait kondisi anak yang bersangkutan.
6	Apakah ada program khusus untuk menarik kembali anak putus sekolah ke jalur pendidikan formal atau kesetaraan?	Setahu saya ada beberapa upaya yang dilakukan. Untuk anak yang masih memungkinkan kembali ke sekolah formal biasanya akan didorong untuk melanjutkan pendidikan kembali. Sedangkan untuk anak yang sudah cukup lama tidak bersekolah atau memiliki kendala tertentu biasanya diarahkan ke program pendidikan kesetaraan melalui PKBM agar tetap mendapatkan layanan pendidikan.
7	Faktor apa yang paling mendukung keberhasilan strategi penanganan ATS?	Menurut saya yang paling mendukung adalah data yang akurat dan kerja sama antarinstansi. Ketika data yang dimiliki sesuai dengan kondisi di lapangan, proses penanganan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu dukungan dari sekolah, pemerintah desa, dan keluarga juga sangat membantu keberhasilan program yang dijalankan.
8	Kendala utama apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program?	Kendala yang sering ditemui biasanya berkaitan dengan validitas data. Kadang ada anak yang sudah pindah domisili tetapi masih tercatat dalam sistem. Ada juga yang sulit ditemui karena sudah bekerja atau berpindah tempat tinggal sehingga proses verifikasi membutuhkan waktu yang cukup lama.
9	Bagaimana cara dinas mengatasi hambatan tersebut?	Biasanya dilakukan koordinasi dan verifikasi ulang melalui sekolah, desa, maupun kecamatan. Jika ditemukan data yang kurang sesuai maka akan dilakukan pembaruan data. Selain itu komunikasi dengan pihak-pihak terkait juga terus dilakukan agar informasi yang diperoleh lebih akurat.
10	Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas program penanganan ATS yang sudah berjalan?	Dari sisi administrasi, evaluasi biasanya dilakukan dengan melihat perkembangan data ATS pada <i>Dashboard</i> . Kami membandingkan jumlah ATS dari waktu ke waktu untuk mengetahui apakah terjadi penurunan atau tidak.

		Selain itu laporan dari lapangan juga menjadi bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana program berjalan dengan baik.
11	Apakah ada indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur capaian strategi?	Indikator yang paling mudah dilihat adalah berkurangnya jumlah ATS yang tercatat dalam sistem. Jika seorang anak sudah kembali bersekolah atau memperoleh layanan pendidikan lainnya, maka status ATS pada sistem akan berubah. Dari situ dapat terlihat perkembangan hasil penanganan yang telah dilakukan.
12	Bagaimana dampak program terhadap penurunan angka ATS di Kabupaten Malang?	Dari data yang kami lihat, program yang dijalankan cukup memberikan dampak positif. Banyak ATS yang sebelumnya belum teridentifikasi akhirnya dapat ditemukan dan ditindaklanjuti. Meskipun belum seluruhnya dapat ditangani, namun secara umum terdapat perkembangan yang cukup baik dibandingkan sebelumnya.
13	Apa rencana jangka panjang dinas dalam menangani ATS di jenjang SMP?	Setahu saya ke depan dinas akan terus memperkuat sistem pendataan dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu juga ada upaya untuk memperluas akses bantuan pendidikan agar lebih banyak anak yang dapat melanjutkan sekolah. Harapannya angka ATS dapat terus berkurang setiap tahunnya.
14	Apa rekomendasi dinas untuk sekolah dan masyarakat agar lebih aktif mencegah anak putus sekolah?	Menurut saya sekolah perlu lebih aktif memantau kondisi peserta didiknya, terutama yang mulai menunjukkan tanda-tanda berisiko putus sekolah. Sementara masyarakat juga perlu lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Jika ada anak yang tidak bersekolah atau mengalami kendala pendidikan, sebaiknya segera dilaporkan agar dapat ditangani lebih cepat.
15	Bagaimana dinas melihat peran penelitian akademik seperti skripsi ini dalam mendukung kebijakan pendidikan?	Penelitian seperti ini menurut saya sangat bermanfaat karena dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Selain itu hasil penelitian juga dapat menjadi bahan masukan bagi dinas untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan. Terkadang dari penelitian mahasiswa muncul ide atau temuan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan program ke depan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Muhamad Nouval Hilmy
 NIM : 220106110092
 Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 19 Agustus 2003
 Program Studi/Fakultas : Manajemen Pendidikan islam/Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 Tahun Masuk : 2022
 Alamat : Jl. A. Yani. Selopuro, Blitar
 No. Telepon : 0895339149023
 Email : mnouvalhilmy@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. KB TKIT Roudlatul Jannah, Blitar (2008-2009)
2. SDI Sunan Giri, Tulungagung (2009-2015)
3. SMP Bustanul Muta'alimin, Kota Blitar (2015-2018)
4. SMK Penerbangan, Malang (2018-2022)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022-2026)